

Laporan Keuangan (Gabungan)

Per 31 Desember 2024
Audited

Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta



KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas otonomi pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan APBD secara otonom, maka diawali dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setiap Pemerintah Daerah juga diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 kemudian memberi pedoman pengelolaan keuangan daerah yang lebih rinci bagi Pemerintah Daerah, diantaranya pedoman mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kedua peraturan perundangan ini telah mencantumkan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAP).

Laporan keuangan pada tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Neraca menyajikan posisi aset, posisi kewajiban, dan posisi ekuitas dana. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menerbitkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan, maka neraca tahun sebelumnya menjadi saldo awal bagi neraca tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Jakarta, 23 Mei 2025
Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta



Iqbal Akbarudin
NIP 197301151998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	ix
N E R A C A	xi
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024	xix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	7
2.1.1 Pendapatan	8
2.1.2 Belanja	8
2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai	10
2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai	10
2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai	11
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	13
3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	14
3.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	14
3.3.1 Pendapatan-LRA	14
3.3.2 Belanja	16
3.3.3 Pendapatan-LO	22
3.3.4 Beban	23
3.3.5 Aset	25
3.3.6 Kewajiban	40
3.3.7 Ekuitas	42
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuanyang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	43
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	44
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	44

4.1.1	Pendapatan Daerah	44
4.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	45
4.1.2	Belanja	46
4.2	Penjelasan Akun-Akun Neraca	51
4.2.1.	Aset	51
4.2.2.	Kewajiban.....	89
4.3	Laporan Operasional.....	96
4.3.1	Pendapatan-LO	97
4.3.1.1	Pendapatan Asli Daerah	97
4.3.1.2	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	97
4.3.2	Beban	98
4.4	Laporan Perubahan Ekuitas.....	103
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	105
5.1	Struktur Organisasi.....	105
5.2	Visi dan Misi	108
5.3	Tugas dan Fungsi SKPD	108
5.4	Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD	110
5.5	Target Kinerja Strategis SKPD	110
5.6	Mekanisme Pembayaran Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024	114
5.7	Pembayaran Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu.....	115
BAB VI		117
LAMPIRAN		118

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Realisasi APBD Dinas Sosial per 31 Desember 2024	7
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis	11
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan	12
Tabel 3. 1 Nilai Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap	17
Tabel 3. 2 Nilai Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap	18
Tabel 3. 3 Pertambahan Masa Manfaat Aset yang Mengalami overhaul/renovasi/perbaikan	19
Tabel 3. 4 Masa Manfaat Aset Tetap	36
Tabel 4. 1 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	45
Tabel 4. 2 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023	45
Tabel 4. 3 Rincian Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Jajaran Tahun 2024 dan 2023	46
Tabel 4. 4 Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024	48
Tabel 4. 5 Aset Lancar Dinas Sosial 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	52
Tabel 4. 6 Perbandingan Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	52
Tabel 4. 7 Rincian Kas Lainnya (Pengembalian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar) per 31 Desember 2023	53
Tabel 4. 8 Perbandingan Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	53
Tabel 4. 9 Rincian Pengembalian Kurang Volume Rehab Gedung Tahun 2024	54
Tabel 4. 10 Rincian Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023	54
Tabel 4. 11 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	55
Tabel 4. 12 Rincian saldo Beban Barang Dibayar Dimuka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	55
Tabel 4. 13 Rincian saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	56
Tabel 4. 14 Rincian saldo Persediaan Tahun 2024 dan 2023	57
Tabel 4. 15 Rincian Mutasi Aset Tetap	58
Tabel 4. 16 Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah	58
Tabel 4. 17 Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah - Transfer Masuk dari SKPD Lain	59
Tabel 4. 18 Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah - Transfer Keluar ke SKPD Lain	59
Tabel 4. 19 Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah - Koreksi Lebih Catat	59
Tabel 4. 20 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	60
Tabel 4. 21 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Transfer Masuk	61
Tabel 4. 22 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklas Antar Aset Tetap	62
Tabel 4. 23 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap	63
Tabel 4. 24 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Kapitalisasi dari Beban Barang	63
Tabel 4. 25 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Transfer Keluar ke SKPD lain	63
Tabel 4. 26 Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin – Reklas antar Aset Tetap	64
Tabel 4. 27 Pengurangan Peralatan dan Mesin – Reklas Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	64
Tabel 4. 28 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	65
Tabel 4. 29 Pengurangan Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	67
Tabel 4. 30 Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin – Reklas Aset Tetap ke Beban Barang Tak Habis Pakai	68
Tabel 4. 31 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Barang Pakai Habis	68
Tabel 4. 32 Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	69
Tabel 4. 33 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Transfer Masuk dari SKPD lain	70
Tabel 4. 34 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Hutang Pihak Ke-3	72
Tabel 4. 35 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklas ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP	72
Tabel 4. 36 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas reklasifikasi aset rusak berat	

menjadi aset tetap	73
Tabel 4. 37 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Kapitalisasi dari Beban Jasa	73
Tabel 4. 38 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Transfer keluar ke SKPD lain	74
Tabel 4. 39 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi antar Aset	75
Tabel 4. 40 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan – Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 ke KDP	75
Tabel 4. 41 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat	76
Tabel 4. 42 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi Aset Tetap selain Belanja Modal 2024 ke Beban Jasa	76
Tabel 4. 43 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi Aset Tetap selain Belanja Modal 2024 ke Beban Pemeliharaan	77
Tabel 4. 44 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 ke Rekening Penampungan	77
Tabel 4. 45 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Pembayaran Utang Belanja Modal yang telah diakui	78
Tabel 4. 46 Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi	78
Tabel 4. 47 Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi - Transfer Masuk dari SKPD lain	79
Tabel 4. 48 Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi - Transfer Keluar ke SKPD lain	80
Tabel 4. 49 Rincian Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	80
Tabel 4. 50 Pengurangan Aset Tetap Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Tetap	81
Tabel 4. 51 Rincian Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan	81
Tabel 4. 52 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan - Reklasifikasi antar Aset Tetap	82
Tabel 4. 53 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan – Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 ..	83
Tabel 4. 54 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan - Reklasifikasi ke-5 Bidang Aset Tetap	83
Tabel 4. 55 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023	84
Tabel 4. 56 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024	84
Tabel 4. 57 Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	85
Tabel 4. 58 Rincian Mutasi Aset Lainnya – Aset Rusak Berat	86
Tabel 4. 59 Penambahan Aset Rusak Berat/Usang - Reklasifikasi Aset Tetap	86
Tabel 4. 60 Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang - Penghapusan	87
Tabel 4. 61 Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang – Reklasifikasi menjadi Aset Tetap	87
Tabel 4. 62 Nilai Buku Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	88
Tabel 4. 63 Mutasi Penambahan - Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset.	88
Tabel 4. 64 Nilai buku Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	89
Tabel 4. 65 Rincian Penyaluran Bantuan Sosial yang Dilakukan setelah Tahun Anggaran	89
Tabel 4. 66 Rincian Utang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	90
Tabel 4. 67 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	90
Tabel 4. 68 Rincian Utang Belanja Jasa TALI	92
Tabel 4. 69 Utang jasa konsultasi pengawasan rehab berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	93
Tabel 4. 70 Rincian Utang Belanja Jasa Non TALI Tahun 2023	93
Tabel 4. 71 Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	94
Tabel 4. 72 Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94
Tabel 4. 73 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	95
Tabel 4. 74 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	95
Tabel 4. 75 Pendapatan LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	97
Tabel 4. 76 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023	97
Tabel 4. 77 Rekapitulasi Beban Dinas Sosial dan Jajaran	98
Tabel 4. 78 Perhitungan Beban Pegawai per 31 Desember 2024	99
Tabel 4. 79 Perhitungan Beban Barang per 31 Desember 2024	100
Tabel 4. 80 Perhitungan Beban Jasa per 31 Desember 2024	101
Tabel 4. 81 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024	101
Tabel 4. 82 Rincian Belanja Bantuan Sosial	102

Tabel 4. 83 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023	103
Tabel 4. 84 Laporan Perubahan Ekuitas.....	104
Tabel 5. 1 Target Kinerja Strategis Dinas Sosial Tahun 2024	110
Tabel 5. 2 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu.....	115
Tabel 5. 3 Hasil Pemeriksaan BPK - Pemotongan Pembayaran Utang Belanja Modal Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rincian Realisasi Belanja Hibah Per 31 Desember 2024	119
Lampiran 2 : Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar per 31 Desember 2024	120
Lampiran 3 : Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	121
Lampiran 4 : Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	122
Lampiran 5 : Pendapatan Hibah-LO	124
Lampiran 6 : Pembayaran Pekerjaan Kontraktual Menggunakan RPBATA	126



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL

Jalan Gunung Sahari II No. 6 – Jakarta Pusat
Telp. (021) 4265115 - 4222497 – 4222498 – 4264679 - 4264678 Fax.4253639
Website : www.dinsos.jakarta.go.id email : dinsosdki@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 10610

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Akbarudin
NIP : 197301151998031003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Unit Organisasi : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Mei 2025

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Iqbal Akbarudin
NIP. 197301151998031003



**LAPORAN KEUANGAN DINAS
SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
31 DESEMBER 2024
*AUDITED***



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2024
AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS SOSIAL (GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	4.1.1.1	169.400.000,00	53.150.000,00	31,38	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		169.400.000,00	53.150.000,00	31,38	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		169.400.000,00	53.150.000,00	31,38	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	4.1.2.1				
Belanja Pegawai	4.1.2.1.a	251.484.881.489,00	241.813.652.444,00	96,15	230.879.139.895,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.b	458.210.819.265,00	440.827.344.094,00	96,21	424.820.818.964,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	4.1.2.1.c	1.325.000.000,00	1.300.000.000,00	98,11	2.892.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.d	699.799.033.297,00	670.772.470.000,00	95,85	882.032.212.775,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		1.410.819.734.051,00	1.354.713.466.538,00	96,02	1.540.624.171.634,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.a	5.913.686.198,00	3.461.169.726,00	58,53	6.791.694.275,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.b	43.663.329.146,00	40.112.964.343,00	91,87	16.892.007.593,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.1.2.2.c	316.667.632,00	313.592.500,00	99,03	89.550,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)					
U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		49.893.682.976,00	43.887.726.569,00	87,96	23.683.791.418,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.460.713.417.027,00	1.398.601.193.107,00	95,75	1.564.307.963.052,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.460.544.017.027,00)	(1.398.548.043.107,00)		(1.564.307.963.052,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(1.460.544.017.027,00)	(1.398.548.043.107,00)		(1.564.307.963.052,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 23 Mei 2025

KEPALA DINAS SOSIAL





NERACA
31 DESEMBER 2024
AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4.2.1.1.1	0,00	12.414.600.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya	4.2.1.1.1	0,00	12.414.600.000,00
Kas Lainnya		0,00	12.414.600.000,00
Kas Lainnya		0,00	12.414.600.000,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.2.1.1.2	172.967.951,00	13.589.894,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	4.2.1.1.2	172.967.951,00	13.589.894,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	4.2.1.1.3	2.394.482.353,00	1.034.907.084,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka	4.2.1.1.3.a	2.359.150.153,00	1.026.173.478,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	4.2.1.1.3.b	35.332.200,00	8.733.606,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan	4.2.1.1.4	22.167.240.159,00	18.335.495.287,00
Barang Pakai Habis		22.166.894.727,00	18.335.495.287,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		345.432,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		24.734.690.463,00	31.798.592.265,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah	4.2.1.2.1	966.664.501.364,00	969.183.921.364,00
Peralatan dan Mesin	4.2.1.2.2	133.001.892.436,00	163.151.117.638,00
Gedung dan Bangunan	4.2.1.2.3	1.337.431.264.617,00	1.300.020.765.271,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.1.2.4	3.225.962.594,00	2.968.370.094,00
Aset Tetap Lainnya	4.2.1.2.5	2.641.394.120,00	2.657.205.920,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.2.1.2.6	11.301.308.534,00	13.508.341.237,00
Akumulasi Penyusutan	4.2.1.2.7	(933.655.004.577,00)	(904.618.314.559,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(121.902.355.448,00)	(150.167.894.149,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(807.641.509.752,00)	(750.495.696.228,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(1.553.229.681,00)	(1.389.875.686,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(2.557.909.696,00)	(2.564.848.496,00)
JUMLAH ASET TETAP		1.520.611.319.088,00	1.546.871.406.965,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.2.1.3	76.580.471.535,00	44.655.831.954,00
Aset Rusak Berat/Usang	4.2.1.3.a	66.977.369.978,00	35.250.440.480,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status	4.2.1.3.b	9.603.101.557,00	8.192.971.474,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Aset			
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.2.1.3.c	0,00	1.212.420.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(69.027.023.125,00)	(30.570.429.516,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(61.600.007.688,00)	(24.553.233.362,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(7.427.015.437,00)	(6.017.196.154,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		7.553.448.410,00	14.085.402.438,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		1.552.899.457.961,00	1.592.755.401.668,00
<u>KEWAJIBAN</u>			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja	4.2.2.1.1	19.241.582.112,00	20.567.266.892,00
Utang Belanja Pegawai	4.2.2.1.a	12.307.596.080,00	14.634.847.714,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		1.484.586.477,00	828.524.161,00
Utang Belanja Barang	4.2.2.1.b	165.906.250,00	0,00
Utang Belanja Jasa	4.2.2.1.c	1.318.680.227,00	828.524.161,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.2.2.1.d	704.735.800,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.2.2.1.d	4.674.663.755,00	5.103.895.017,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.2.1.d	70.000.000,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		19.241.582.112,00	20.567.266.892,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		19.241.582.112,00	20.567.266.892,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		138.684.244.513,00	16.749.003.371,00
Ekuitas SAL		0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		1.394.973.631.336,00	1.555.439.131.405,00
RK PPKD Kas		1.398.548.043.107,00	1.564.307.963.052,00
RK PPKD Non Kas		(3.574.411.771,00)	(8.868.831.647,00)
JUMLAH EKUITAS		1.533.657.875.849,00	1.572.188.134.776,00
JUMLAH EKUITAS		1.533.657.875.849,00	1.572.188.134.776,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.552.899.457.961,00	1.592.755.401.668,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023





LAPORAN OPERASIONAL
31 DESEMBER 2024
AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

10201000 - DINAS SOSIAL (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
<u>PENDAPATAN</u>					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		53.150.000,00	0,00	53.150.000,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	4.3.1.1	53.150.000,00	0,00	53.150.000,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		510.438.153,00	629.296.705,00	(118.858.552,00)	(18,89)
Pendapatan Hibah-LO	4.3.1.2	510.438.153,00	629.296.705,00	(118.858.552,00)	(18,89)
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		563.588.153,00	629.296.705,00	(65.708.552,00)	(10,44)
<u>BEBAN</u>					
BEBAN OPERASI		1.351.393.024.614,00	1.525.958.286.784,00	(174.565.262.170,00)	(11,44)
Beban Pegawai	4.3.2.1.a	239.486.400.810,00	230.797.868.932,00	8.688.531.878,00	3,76
Beban Barang dan Jasa		438.621.733.804,00	423.801.905.077,00	14.819.828.727,00	3,50
Beban Barang	4.3.2.1.b	200.507.177.961,00	186.762.167.406,00	13.745.010.555,00	7,36
Beban Jasa	4.3.2.1.c	212.944.986.062,00	225.899.909.254,00	(12.954.923.192,00)	(5,73)
Beban Pemeliharaan	4.3.2.1.d	9.525.153.481,00	9.703.338.347,00	(178.184.866,00)	(1,84)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.3.2.1.e	15.644.416.300,00	1.436.490.070,00	14.207.926.230,00	989,07
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	4.3.2.1.f	1.300.000.000,00	2.892.000.000,00	(1.592.000.000,00)	(55,05)
Beban Bantuan Sosial	4.3.2.1.g	671.984.890.000,00	868.466.512.775,00	(196.481.622.775,00)	(22,62)
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.3.2.2	58.571.276.009,00	60.381.210.339,00	(1.809.934.330,00)	(3,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		4.506.738.601,00	7.876.528.646,00	(3.369.790.045,00)	(42,78)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		53.415.713.431,00	52.325.068.767,00	1.090.644.664,00	2,08
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		150.909.551,00	138.729.926,00	12.179.625,00	8,78
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		4.000.000,00	40.883.000,00	(36.883.000,00)	(90,22)
Beban Penyusutan Aset Lainnya		493.914.426,00	0,00	493.914.426,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		1.409.964.300.623,00	1.586.339.497.123,00	(176.375.196.500,00)	112,51
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(1.409.400.712.470,00)	(1.585.710.200.418,00)	176.309.487.948,00	(11,12)
<u>NON OPERASIONAL</u>					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10201000 - DINAS SOSIAL (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
<u>POS LUAR BIASA</u>					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(1.409.400.712.470,00)	(1.585.710.200.418,00)	176.309.487.948,00	(11,12)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 23 Mei 2025

KEPALA DINAS SOSIAL



IOBALAKBARUDIN
NIP. 196705081992122001



**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
31 DESEMBER 2024
*AUDITED***



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2023 dan 2022		16.749.003.371,00	4.331.722.601,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		1.543.010.941.511,00	1.527.088.249.536,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	37.640.396.904,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2024		1.559.759.944.882,00	1.569.060.369.041,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 2022		1.555.439.131.405,00	1.541.177.530.270,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(1.543.010.941.511,00)	(1.527.088.249.536,00)
RK PPKD per 1 Januari 2024		12.428.189.894,00	14.089.280.734,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		1.572.188.134.776,00	1.583.149.649.775,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(1.409.400.712.470,00)	(1.585.710.200.418,00)
Mutasi RK PPKD		1.382.545.441.442,00	1.541.349.850.671,00
Koreksi Ekuitas		(11.674.987.899,00)	33.398.834.748,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		(38.530.258.927,00)	(10.961.514.999,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		138.684.244.513,00	16.749.003.371,00
RK PPKD		1.394.973.631.336,00	1.555.439.131.405,00
EKUITAS AKHIR	4.2.3	1.533.657.875.849,00	1.572.188.134.776,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

JAKARTA, 23 Mei 2025,

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

IQBAL AKBARUDIN

NIP. 197301151998031003



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
*AUDITED***



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu

periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, aset, kewajiban, dan kenaikan/penurunan ekuitas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan.
- b. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Perubahan posisi keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024 menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No 161 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

- Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrua;
 19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022;
 20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
 21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023;
 22. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan;
 23. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajaran Tahun Anggaran 2024 dibagi ke dalam enam (enam) Bab, terdiri dari:

Bab 1 : Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan

sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab 2 : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab 3 : Kebijakan Akuntansi

Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bab 4 : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-komponen laporan arus kas, disamping itu memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Bab 5 : Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan seperti struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi skpd, tujuan dan sasaran strategis skpd, target kinerja strategis skpd, penghargaan yang diterima, dan lain-lain.

Bab 6 : Penutup

Berisi Penutup yang diuraikan mengenai ikhtisar secara garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024 terdapat Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam ringkasan tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Ringkasan Realisasi APBD Dinas Sosial per 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	169.400.000,00	53.150.000,00	31,38%	-
1.1	Pendapatan Asli Daerah	169.400.000,00	53.150.000,00	31,38%	-
1.1.1	Pendapatan Retribusi	169.400.000,00	53.150.000,00	31,38%	-
2	BELANJA	1.460.713.417.027,00	1.398.601.193.107,00	95,75%	1.564.307.963.052,00
2.1	Belanja Operasi	1.410.819.734.051,00	1.354.713.466.538,00	96,02%	1.540.624.171.634,00
2.1.1	Belanja Pegawai	251.484.881.489,00	241.813.652.444,00	96,15%	230.879.139.895
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	458.210.819.265,00	440.827.344.094,00	96,21%	424.820.818.964
2.1.3	Belanja Hibah	1.325.000.000,00	1.300.000.000,00	98,11%	2.892.000.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	699.799.033.297,00	670.772.470.000,00	95,85%	882.032.212.775
2.2	Belanja Modal	49.893.682.976,00	43.887.726.569,00	87,96%	23.683.791.418,00
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	5.913.686.198,00	3.461.169.726,00	58,53%	6.791.694.275
2.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	43.663.329.146,00	40.112.964.343,00	91,87%	16.892.007.593
2.2.3	Belanja Jalan dan Irigasi	316.667.632,00	313.592.500,00	99,03%	89.550
3	SILPA	(1.460.544.017.027,00)	(1.398.548.043.107,00)		(1.564.307.963.052,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp53.150.000,00 atau 31,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp169.400.000,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berupa Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp53.150.000,00

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp53.150.000,00 atau 100,00% dari Tahun 2023 sebab Dinas Sosial baru melakukan pungutan retribusi pemanfaatan aset daerah atas penggunaan ruangan pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari pada Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Jajaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.398.548.043.107,00 atau sebesar 95,75% dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.460.713.417.027,00. Apabila realisasi belanja tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp1.564.307.963.052,00, maka realisasi belanja Dinas Sosial dan Jajaran Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp165.759.919.945,00 atau 11,60%. Realisasi belanja dinas sosial terdiri dari:

- a. Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.354.713.466.538,00 atau 96,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.410.819.734.051,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

- 1) Realisasi belanja pegawai sebesar Rp241.813.652.444,00 atau

96,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp251.484.881.489,00. Sisa anggaran sebesar Rp9.671.229.045,00 merupakan nilai belanja pegawai yang tidak terealisasi karena tidak adanya pelantikan baru untuk jabatan yang kosong dan tidak adanya pelantikan fungsional;

- 2) Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp440.827.344.094,00 atau 96,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp458.210.819.265,00. Sisa anggaran sebesar Rp17.383.475.171,00 merupakan sisa harga penawaran dari pembelian barang/jasa, tidak dilaksanakannya belanja konsultasi perencanaan dan pengawasan pengadaan genset dan pemeliharaan *lobby* gedung kantor Dinas Sosial, pemberian dana stimulasi karang taruna yang tidak teralisasi maksimal karena beberapa karang taruna tidak memenuhi syarat-syarat administrasi dan pelaksanaan kegiatan kebencanaan yang tidak terealisasi maksimal karena keterjadian bencana yang tidak dapat diprediksi;
- 3) Realisasi belanja hibah sebesar Rp1.300.000.000,00 atau 98,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.325.000.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp25.000.000,00 merupakan pemberian hibah kepada Yayasan Yatim dan Dhuafa Al Ausathiyah yang tidak teralisasi karena Yayasan tersebut tidak menyerahkan dokumen kelengkapan terkait pemberian hibah; dan
- 4) Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp670.772.470.000,00 atau 95,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp699.799.033.297,00. Sisa anggaran sebesar Rp29.026.563.297,00 merupakan sisa anggaran belanja bantuan sosial yang tidak direalisasikan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Dinas Sosial dengan Bank DKI atas

penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.

b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp43.193.823.290,00 atau 86,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.893.682.976,00, terdiri dari :

- 1) Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3.461.169.726,00 atau 58,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.913.686.198,00. Sisa anggaran sebesar Rp2.452.516.472,00 merupakan sisa harga penawaran barang dan sisa anggaran pengadaan genset gedung kantor Dinas Sosial yang tidak dilaksanakan;
- 2) Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp40.112.964.343,00 atau 91,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp43.663.329.146,00. Sisa anggaran sebesar Rp3.550.364.803,00 merupakan sisa anggaran atas pelaksanaan rehabilitasi gedung Panti Sosial dan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT);
- 3) Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp313.592.500,00 atau 99,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp316.667.632,00. Sisa anggaran sebesar Rp3.075.132,00 merupakan sisa penawaran harga barang.

Dari data realisasi Belanja maka posisi SiKPA Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp1.398.548.043.107,00. Penjelasan lebih rinci masing-masing komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 4.

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai

Capaian perjanjian kinerja dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Kinerja Keuangan		
		Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja	Target Keuangan TW 4	Realisasi Anggaran TW 4	% Realisasi TW 4
Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Berfungsi Sosial	100	100	100,00%	100,00%	1.440.552.322.995,00	1.380.044.195.247,00	95,80%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	0,89	0,9	101,12%	101,12%	20.161.094.032,00	18.556.997.860,00	92,04%
Total						1.460.713.417.027,00	1.398.601.193.107,00	95,75%

Adapun hambatan yang dialami Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- Padatnya jadwal penginputan dan sosialisasi pada sistem baru mengakibatkan keterbatasan pengetahuan SDM sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan input realisasi yang belum maksimal
- Terbitnya Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengakibatkan penyesuaian realisasi atas target yang sudah terinput pada sistem aktivitas
- Adanya keterlambatan dari pihak ketiga dalam menangani proses kelengkapan syarat administrasi mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan kinerja
- Belum tersedianya data regsosek dari Bappenas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai

Penyampaian capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Kinerja Keuangan		
	Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja	Target Keuangan TW 4	Realisasi Anggaran TW 4	Presenta se Realisasi TW 4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4	4	100,00%	100,00%	359.560.543.933,00	341.267.689.771,00	94,91%
Program Rehabilitasi Sosial	100	99,5825	99,58%	99,58%	293.805.295.886,00	285.257.895.714,00	96,85%
Program Pemberdayaan Sosial	79,8	83,97	105,23%	105,23%	20.161.094.032,00	18.556.997.860,00	92,04%
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100	100	100,00%	100,00%	749.140.348.344,00	719.136.164.823,00	95,99%
Program Penanganan Bencana	100	99,83	99,83%	99,83%	38.046.134.832,00	35.076.348.218,00	92,19%

Adapun hambatan yang dialami Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target Program/Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Belum semua Karang Taruna membuat rekening organisasi dan beberapa Karang Taruna yang sedang dalam proses perubahan struktur organisasi belum melaporkan Laporan Pertanggungjawaban
- Suku Dinas Sosial Kota Administrasi telah melaksanakan pembinaan dengan berbagai macam pendekatan tetapi Karang Taruna tetap tidak kooperatif
- Pemberian Dana Hibah tidak tercapai sesuai dengan target dikarenakan Yayasan/Lembaga belum melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga tidak dapat dilakukan pendistribusian Dana Hibah kepada Yayasan tersebut.
- Pelaksanaan dan Pengawasan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Termin 4 dan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Gedung Pusat Data dan Informasi tidak dapat terselesaikan sampai dengan batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga sisa pembayarannya akan menjadi utang yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pada Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tugas pokok, fungsi setiap unit atau satuan kerja pada Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pada Pemerintahan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya merupakan gabungan dari Laporan Dinas Sosial dan 30 (delapan puluh delapan) UKPD dibawah Dinas Sosial, 22 (dua puluh dua) Panti Sosial, 1 (satu) Sekretariat Masjid Raya Hasyim Asy'hari, 1 (satu) Unit Pengelola Kawasan (UPK) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, 1 (satu) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 5 (lima) Suku Dinas Wilayah dan satu entitas induk.

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal realisasi anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan di Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam penyajian neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas diterima / dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

3.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- b. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- c. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan

basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan

untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan

- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Nilai Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
a.	Hewan	300.000
b.	Ternak	300.000
c.	Tumbuhan Pohon	300.000
d.	Tumbuhan Tanaman Hias	ekstrakomtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran

belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Nilai Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000

3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	Tumbuhan Pohon Tumbuhan Tanaman Hias	300.000
		ekstra komtabel
5.4	d. Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami *overhaul/renovasi/perbaikan* yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3. 3
Pertambahan Masa Manfaat Aset yang Mengalami overhaul/renovasi/perbaikan

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat tor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1

		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studi dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10

		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa

barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

3.3.3 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer- LO, Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional- LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

- a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;
- b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: Beban Pegawai, Beban Barang Dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Dan Beban Lain-Lain; Beban Penyusutan Dan Amortisasi.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban

pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

3.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- c. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 1. diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 2. berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pada pos kas dan setara kas berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017, kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 2 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau

perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Dinas Sosial dan/atau hak Dinas Sosial yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, dan perikatan serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

- e. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang Dinas Sosial dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat

perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan *bufferstock* bencana. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
- 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

3.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan

ongkos/biaya untuk dipelihara.

b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaandalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalahklasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

1) Tanah

2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

- alat-alat berat
- alat-alat angkutan
- alat-alat bengkel dan alat ukur
- alat-alat pertanian/peternakan
- alat-alat kantor dan rumah tangga
- alat studio dan alat komunikasi
- alat-alat kedokteran
- alat-alat laboratorium
- alat keamanan

3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

- bangunan gedung
- bangunan monumen

4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiriatas:

- jalan dan jembatan
- bangunan air/irigasi
- instalasi
- jaringan

5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- buku dan perpustakaan
- barang bercorak kesenian/kebudayaan
- hewan/ternak dan tumbuhan
- aset tetap-renovasi

6) konstruksi dalam pengerjaan

b. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau konstruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis;
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya

lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;

- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan

merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;

- 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

3.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode

akuntansi.

b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu bendaberwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan

aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh Masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi :

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Uang Jaminan/Retensi;
- 6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

3.3.5.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau

kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

Tabel 3. 4
Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5

5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih Pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa
- e. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3.3.5.5 Amortisasi Aset

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
- c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- e. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa

manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.3.5.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:

- a. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- b. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- c. Aset tidak berwujud;
- d. Aset lain-lain.

3.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK

Penghapusan.

- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang

sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

3. Pengukuran Kewajiban

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- b. Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

- c. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- d. Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
- e. Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
- f. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

3.3.7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 3) Ekuitas Akhir.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah konsolidasi dari laporan keuangan UKPD dan UPT sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023. Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

4.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp169.400.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp53.150.000,00 atau 31,38% dari target. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.150.000,00 atau 100,00% dari Tahun

2023 sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Daerah pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	Pendapatan Daerah	169,400,000	53,150,000	31.38%	-
	Pendapatan Asli Daerah	169,400,000	53,150,000	31.38%	-

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Pendapatan Retribusi sebesar Rp53.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	Pendapatan Retribusi Daerah	169.400.000	53.150.000	31,38%	-
	Penggunaan Ruang pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	49.400.000	21.650.000	43,83%	-
	Penggunaan Ruang pada Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari	120.000.000	31.500.000	26,25%	-

Pendapatan retribusi pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan pendapatan atas penggunaan ruang pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari. Realisasi pendapatan retribusi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 tidak dapat mencapai target dikarenakan:

1. Target pendapatan baru diusulkan pada 26 Agustus 2024 dengan perkiraan penerimaan retribusi akan dilaksanakan pada Bulan September s.d Desember 2024 namun Perubahan Retribusi baru dapat dilaksanakan setelah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 pada 16 Oktober 2024;

2. Sarana dan Prasarana pendukung (misal: meja, kursi, panggung) yang ada pada unit kerja objek retribusi dalam kondisi rusak berat
3. Objek retribusi masih digunakan untuk kegiatan keagamaan rutin oleh lembaga lain.

4.1.2 Belanja

Belanja Dinas Sosial Provinsi dan Jajarannya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.460.713.417.027,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.398.601.193.107,00 atau 95,75% dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp62.112.223.920,00 atau 4,25%. Apabila realisasi belanja per 31 Desember 2024 tersebut dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp1.564.307.963.052,00 maka realisasi per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp165.759.919.945,00 atau 10,60%. Realisasi belanja Dinas Sosial dan Jajaran tahun 2024 dan 2023 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 3
Rincian Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Jajaran Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	BELANJA	1.460.713.417.027,00	1.398.601.193.107,00	95,75%	1.564.307.963.052,00
1.1	Belanja Operasi	1.410.819.734.051,00	1.354.713.466.538,00	96,02%	1.540.624.171.634,00
1.1.1	Belanja Pegawai	251.484.881.489,00	241.813.652.444,00	96,15%	230.879.139.895,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	458.210.819.265,00	440.827.344.094,00	96,21%	424.820.818.964,00
1.1.3	Belanja Hibah	1.325.000.000,00	1.300.000.000,00	98,11%	2.892.000.000,00
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	699.799.033.297,00	670.772.470.000,00	95,85%	882.032.212.775,00
1.2	Belanja Modal	49.893.682.976,00	43.887.726.569,00	87,96%	23.683.791.418,00
1.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	5.913.686.198,00	3.461.169.726,00	58,53%	6.791.694.275,00
1.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	43.663.329.146,00	40.112.964.343,00	91,87%	16.892.007.593,00
1.2.3	Belanja Jalan dan Irigasi	316.667.632,00	313.592.500,00	99,03%	89.550,00

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi Dinas Sosial dan Jajarannya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.410.819.734.051,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.354.713.466.538,00 atau sebesar 96,02% dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp56.106.267.513,00 atau 3,98%. Apabila realisasi belanja operasi per 31 Desember 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja operasi per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp1.540.624.171.634,00 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp185.910.705.096,00 atau 12,07%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp251.484.881.489,00. realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp241.813.652.444,00 atau 96,15% dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp9.671.229.045,00 atau 3,85%.

Apabila realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp230.879.139.895,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2024 sebesar Rp10.934.512.549,00 atau 4,74%.

Rincian realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4
Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	32,532,090,215	31,278,582,500	96.15%
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	206,872,470	201,826,800	97.56%
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2,879,109,079	2,728,936,936	94.78%
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	31,281,266	16,482,544	52.69%
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	977,255,500	865,220,000	88.54%
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,239,457,000	621,840,000	50.17%
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32,656,500	28,320,000	86.72%
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1,128,878,625	1,096,160,000	97.10%
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	1,650,292,476	1,574,700,480	95.42%
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	18,753,840	10,500,900	55.99%
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29,091,962,150	26,881,580,100	92.40%
12	Belanja Pembulatan Gaji PNS	454,000	374,269	82.44%
13	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,000	2,310	16.50%
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5,239,640,785	4,720,885,726	90.10%
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	176,184,003,583	171,550,458,547	97.37%
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	272,160,000	237,781,332	87.37%
Jumlah		251,484,881,489	241,813,652,444	96.15%

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp458.210.819.265,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp440.827.344.094,00 atau 96,21% dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp17.383.475.171,00 atau 3,79%. Apabila realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp424.820.818.964,00 maka terdapat kenaikan realisasi di tahun 2024 sebesar Rp16.006.525.130,00 atau 3,77%.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian belanja hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Belanja hibah Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.325.000.000,00. Realisasi belanja hibah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.300.000.000,00 atau 98,11%. Apabila realisasi belanja hibah per 31 Desember 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja hibah per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp2.892.000.000,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.592.000.000,00 atau 55,05%.

Terdapat 35 Yayasan/Lembaga yang diberikan hibah oleh Dinas Sosial pada Tahun 2024 dengan rincian pada Lampiran 1.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja bantuan sosial Tahun anggaran 2024 dianggarkan

sebesar Rp699.799.033.297,00. Realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp670.772.470.000,00 atau 95,85% dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp29.026.563.297,00 atau sebesar 4,15%. Apabila realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp882.032.212.775,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2024 sebesar Rp211.259.742.775,00 atau 23,95%. Rincian realisasi belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal Dinas Sosial dan Jajarannya meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp49.893.682.976,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp43.887.726.569,00 atau sebesar 87,96% dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp6.005.956.407,00 atau 12,04%. Penjelasan lebih lanjut realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp5.913.686.198,00, dengan realisasi per 31 Desember

2024 adalah sebesar Rp3.461.169.726,00 atau 58,53%. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp2.452.516.472,00 atau 41,47%. Jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp6.791.694.275,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.330.524.549,00 atau 49,04%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 3.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp43.663.329.146,00 dengan realisasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp40.112.964.343,00 atau 91,87%. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp3.550.364.803,00 atau 8,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp16.892.007.593,00, terjadi kenaikan sebesar Rp23.220.956.750,00 atau 137,47%.

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2024 dianggarkan sebesar Rp316.667.632,00 dengan realisasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp313.592.500,00 atau 99,03%. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp3.075.132,00 atau 0,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp89.550,00 terjadi kenaikan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp313.502.950,00 atau 350.087,05%.

4.2 Penjelasan Akun-Akun Neraca

4.2.1. Aset

Aset Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya, Rincian setiap dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Saldo Aset Lancar Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Aset Lancar Dinas Sosial 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas dan Setara Kas	-	12.414.600.000,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
- Kas Lainnya	-	12.414.600.000,00
Piutang Pendapatan	172.967.951,00	13.589.894,00
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	172.967.951,00	13.589.894,00
Belanja Dibayar Dimuka	2.394.482.353,00	1.034.907.084,00
- Belanja Barang Dibayar Dimuka	2.359.150.153,00	1.026.173.478,00
- Belanja Jasa Dibayar Dimuka	35.332.200,00	8.733.606,00
Persediaan	22.167.240.159,00	18.335.495.287,00
- Barang Pakai Habis	22.166.894.727,00	18.335.495.287,00
- Barang Bekas Dipakai	345.432,00	-
Jumlah	24.734.690.463,00	31.798.592.265,00

4.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank

Kas di Bank per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo kas di bank merupakan sisa uang persediaan pada rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b. Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.414.600.000,00. Perbandingan kas lainnya per 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023 adalah:

Tabel 4. 6
Perbandingan Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Kas Lainnya	-	12,414,600,000.00	12,414,600,000	-100%

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 merupakan saldo atas pengembalian anggaran atas penyaluran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) yang gagal salur dengan rincian berikut:

Tabel 4. 7
Rincian Kas Lainnya (Pengembalian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar) per 31 Desember 2023

No	Jenis Bansos	31 Desember 2023
1	Kartu Anak Jakarta (KAJ)	Rp 4,832,100,000
2	Kartu Lansia Jakarta (KLJ)	Rp 6,762,600,000
3	Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)	Rp 589,800,000
4	Kartu Peduli Anak Dan Remaja Jakarta (KPARJ)	Rp 230,100,000
Jumlah		Rp 12,414,600,000

4.2.1.1.2 Piutang

a. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp172.967.951,00 dan Rp13.589.894,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Perbandingan Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Piutang lain-lain PAD yang sah	172.967.951,00	13.589.894,00	159.378.057	1172,77%

Piutang lain-lain PAD yang sah pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 merupakan nilai pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Rincian Pengembalian Kurang Volume Rehab Gedung Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Pengembalian
1	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan rehab total gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng	40.777.207,00
2	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung A dan B Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	22.292.044,00
3	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan lanjutan pelaksanaan pemeliharaan gedung A dan B Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	18.182.521,00
4	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan perawatan dan pemeliharaan Gedung Eks. LBK Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 2	29.472.820,00
5	Pengembalian atas kekurangan volume pelaksanaan 5 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur	62.243.359,00
Total		172.967.951,00

Piutang lain-lain PAD yang sah pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 merupakan piutang atas pendapatan pengembalian biaya admin atas penerima Bantuan Sosial dan pengembalian atas kelebihan pembayaran pada pelaksanaan rehab gedung Panti Sosial yang kurang volume dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Rincian Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023
Piutang atas pendapatan pengembalian		Rp 13.589.894
1	Piutang Pendapatan atas kelebihan pembayaran Rehab PSPBK HM karena kekurangan volume pekerjaan	Rp 4.118.660
2	Piutang Pendapatan atas kelebihan pembayaran Rehab PSBR TJ 2 karena kekurangan volume pekerjaan	Rp 8.691.234
3	Piutang Pendapatan atas pengembalian biaya admin penerima Bantuan Sosial PKD Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang gagal salur	Rp 780.000

4.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp2.394.482.353,00 dan Rp1.034.907.084,00. Rincian saldo Beban Dibayar Dimuka Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

Tabel 4. 11
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Barang Dibayar Dimuka	2.359.150.153,00	1.026.173.478,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	35.332.200,00	8.733.606,00
Jumlah	2.394.482.353,00	1.034.907.084,00

a. Beban barang dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.359.150.153,00 dan Rp1.026.173.478,00. Beban barang dibayar dimuka adalah sisa bahan bakar minyak yang masih ada pada RFID dengan rincian:

Tabel 4. 12
Rincian saldo Beban Barang Dibayar Dimuka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

NO	SKPD/UKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Dinas Sosial	Rp 461.348.283,00	Rp 150.211.894,00
2	PSAA Putra Utama 1	Rp 81.311.082,00	Rp 41.183.140,00
3	PSAA Putra Utama 2	Rp 20.140.433,00	Rp 49.090,00
4	PSAA Putra Utama 3	Rp 49.688.023,00	Rp -
5	PSAA Balita Tunas Bangsa	Rp 15.266.119,00	Rp 14.936.907,00
6	PSBR Taruna Jaya 1	Rp 33.907.520,00	Rp 549,00
7	PSTW Budi Mulia 1	Rp 128.623,00	Rp 1.210.053,00
8	PSTW Budi Mulia 2	Rp 430,00	Rp 214,00
9	PSTW Budi Mulia 3	Rp 89.442.752,00	Rp 60.549.886,00
10	PSTW Budi Mulia 4	Rp 840.612,00	Rp 31.402,00
11	PSBI Bangun Daya 1	Rp 44.859.680,00	Rp 1.242.224,00
12	PSBI Bangun Daya 2	Rp 40.301.288,00	Rp 26.192.681,00
13	PSBD Budi Bhakti 1	Rp 14.643.777,00	Rp 11.116.617,00
14	PSBD Budi Bhakti 2	Rp 55.405.520,00	Rp 26.237.314,00
15	PSBN Cahaya Bathin	Rp 20.789.547,00	Rp 2.080.330,00
16	PSBG Belaian Kasih	Rp 22.364.223,00	Rp 19.310.873,00
17	PSBL Harapan Sentosa 1	Rp 8.718.917,00	Rp 47.033.373,00
18	PSBL Harapan Sentosa 2	Rp 46.242.393,00	Rp 16.157.981,00
19	PSBL Harapan Sentosa 3	Rp 15.258.406,00	Rp 5.177.496,00
20	PSBL Harapan Sentosa 4	Rp 19.673.882,00	Rp 3.648.399,00
21	PSBK Harapan Jaya	Rp 8.814.445,00	Rp 9.679.235,00
22	PSBR Taruna Jaya 2	Rp 162.451.915,00	Rp 10.329.629,00
23	PSPBK Harapan Mulia	Rp 10.278.846,00	Rp 30.852.270,00
24	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'hari	Rp 1.039.178,00	Rp -
25	UPK PPPIJ	Rp -	Rp -
26	Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Rp -	Rp -
27	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rp 86.166.917,00	Rp 17.068.833,00
28	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp 432.600.922,00	Rp 81.130.307,00

NO	SKPD/UKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
29	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp 138.855.601,00	Rp 175.382.866,00
30	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rp 306.308.675,00	Rp 175.125.450,00
31	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Rp 172.302.144,00	Rp 100.234.465,00
	JUMLAH	Rp 2.359.150.153,00	Rp 1.026.173.478,00

b. Beban jasa dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp35.332.200,00 dan Rp8.733.606,00. Beban jasa dibayar dimuka adalah sisa saldo pada kartu e-money (uang elektronik). Rincian Beban Jasa dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Rincian saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

NO	SKPD/UKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara	Rp 35,332,200.00	Rp 5,201,106.00
2	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	Rp -	Rp 3,532,500.00
	JUMLAH	Rp 35,332,200.00	Rp 8,733,606.00

4.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp22.167.240.159,00 dan Rp18.335.495.287,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 14
Rincian saldo Persediaan Tahun 2024 dan 2023

NO	SKPD/UKPD	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
PERSEDIAAN PAKAI HABIS			
1	DINAS SOSIAL	Rp 9,263,532,350	Rp 6,270,724,627
2	PSAA Putra Utama 1	Rp 163,416,430	Rp 157,733,419
3	PSAA Putra Utama 2	Rp 234,394,765	Rp 83,165,465
4	PSAA Putra Utama 3	Rp 137,369,655	Rp 81,139,237
5	PSAA Balita Tunas Bangsa	Rp 128,073,022	Rp 105,590,036
6	PSBR Taruna Jaya 1	Rp 219,623,085	Rp 234,846,842
7	PSTW Budi Mulia 1	Rp 163,768,511	Rp 259,234,664
8	PSTW Budi Mulia 2	Rp 136,605,474	Rp 440,638,846
9	PSTW Budi Mulia 3	Rp 839,372,498	Rp 182,254,408
10	PSTW Budi Mulia 4	Rp 98,764,071	Rp 188,570,000
11	PSBI Bangun Daya 1	Rp 235,894,050	Rp 262,164,687
12	PSBI Bangun Daya 2	Rp 98,997,095	Rp 193,112,621
13	PSBD Budi Bhakti 1	Rp 890,838,963	Rp 793,577,609
14	PSBD Budi Bhakti 2	Rp 1,500,091,806	Rp 1,059,094,679
15	PSBN Cahaya Bathin	Rp 38,009,946	Rp 34,900,065
16	PSBG Belaian Kasih	Rp 429,195,000	Rp 302,258,171
17	PSBL Harapan Sentosa 1	Rp 193,760,200	Rp 680,439,043
18	PSBL Harapan Sentosa 2	Rp 997,715,945	Rp 1,842,201,059
19	PSBL Harapan Sentosa 3	Rp 189,667,134	Rp 339,865,745
20	PSBL Harapan Sentosa 4	Rp 648,625,581	Rp 322,723,819
21	PSBK Harapan Jaya	Rp 466,742,613	Rp 424,415,262
22	PSBR Taruna Jaya 2	Rp 445,494,870	Rp 75,971,032
23	PSPBK Harapan Mulia	Rp 1,038,931,257	Rp 1,607,018,332
24	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'hari	Rp 87,021,894	Rp 9,463,275
25	UPK PPU	Rp 71,010,797	Rp 502,793,406
26	Pusdatin Kesejahteraan Sosial	Rp 211,139,980	Rp 131,979,714
27	Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat	Rp 641,813,730	Rp 288,222,878
28	Suku Dinas Sosial Jakarta Utara	Rp 491,446,379	Rp 493,915,771
29	Suku Dinas Sosial Jakarta Barat	Rp 921,236,898	Rp 639,799,846
30	Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan	Rp 625,654,193	Rp 308,853,229
31	Suku Dinas Sosial Jakarta Timur	Rp 558,686,535	Rp 18,827,500
JUMLAH PERSEDIAAN PAKAI HABIS		Rp 22,166,894,727	Rp 18,335,495,287
PERSEDIAAN BARANG BEKAS DIPAKAI			
1	PSBI Bangun Daya 2	Rp 345,432	Rp -
JUMLAH PERSEDIAAN PAKAI HABIS		Rp 345,432	Rp -
JUMLAH PERSEDIAAN TOTAL		Rp 22,167,240,159	Rp 18,335,495,287

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.454.266.323.665,00 dan Rp2.451.489.721.524,00. Rekapitulasi Aset Tetap tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 15
Rincian Mutasi Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	969.183.921.364,00	225.000.000,00	2.744.420.000,00	966.664.501.364,00
2	Peralatan dan Mesin	163.151.117.638,00	8.486.674.695,00	38.635.899.897,00	133.001.892.436,00
3	Gedung dan Bangunan	1.300.020.765.271,00	116.464.723.228,00	79.054.223.882,00	1.337.431.264.617,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.968.370.094,00	439.055.500,00	181.463.000,00	3.225.962.594,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.657.205.920,00	-	15.811.800,00	2.641.394.120,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.508.341.237,00	10.023.038.784,00	12.230.071.487,00	11.301.308.534,00
	Jumlah	2.451.489.721.524,00	135.638.492.207,00	132.861.890.066,00	2.454.266.323.665,00

Penjelasan Aset Tetap dari uraian tersebut di atas adalah sebagai berikut :

4.2.1.2.1 Tanah

Saldo aset tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp966.664.501.364,00 dan Rp969.183.921.364,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp225.000.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.744.420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 16
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah

Saldo Awal	969,183,921,364.00
A Mutasi Penambahan	
1) Transfer Masuk dari SKPD Lain	225,000,000.00
Jumlah Penambahan	225,000,000.00
B Mutasi Pengurangan	
1) Transfer Keluar ke SKPD Lain	225,000,000.00
2) Koreksi Lebih Catat Barang	2,519,420,000.00
Jumlah Pengurangan	2,744,420,000.00
Saldo Akhir	966,664,501,364.00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan tanah dapat disajikan sebagai berikut :

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan aset tetap tanah dari transfer masuk SKPD lain sebesar Rp225.000.000,00 terdapat pada Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara dengan rincian:

Tabel 4. 17
Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah - Transfer Masuk dari SKPD Lain

Asal Aset	Jenis Aset	Rincian Aset	Nilai Total
Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Ukuran 250 M2, Jalan Persahabatan RT 001/RW 017, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Adm. Jakarta Utara	225.000.000,00

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Pengurangan Aset Tetap Tanah dari transfer keluar ke SKPD lain sebesar Rp225.000.000,00 terdapat pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dengan rincian:

Tabel 4. 18
Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah - Transfer Keluar ke SKPD Lain

Unit Penerima	Jenis Aset	Rincian Aset	Nilai Total
Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Ukuran 250 M2, Jalan Persahabatan RT 001/RW 017, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Adm. Jakarta Utara	225.000.000,00

- 2) Pengurangan Aset Tetap Tanah dari koreksi lebih catat nilai tanah sebesar Rp2.519.420.000 pada beberapa unit kerja pada Dinas Sosial dengan rincian:

Tabel 4. 19
Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah - Koreksi Lebih Catat

No	Unit Kerja	Jenis Aset	Nilai Total
1	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Pusat	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	674.100.000,00
2	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	85.920.000,00
		Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	750.000.000,00

No	Unit Kerja	Jenis Aset	Nilai Total
3	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Selatan	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	57.000.000,00
		Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	342.000.000,00
4	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	450.000.000,00
		Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	160.400.000,00
TOTAL			2.519.420.000,00

4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp133.001.892.436,00 dan Rp163.151.117.638,00. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp8.486.674.695,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp38.635.899.897,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 20
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Saldo Awal		163.151.117.638,00
<u>A. Mutasi Penambahan</u>		
1)	Belanja Modal	3.461.169.726,00
2)	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	531.174.153,00
3)	Transfer Masuk dari SKPD Lain	4.223.567.416,00
4)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	98.231.800,00
5)	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	160.000.000,00
6)	Kapitalisasi dari Beban Barang	12.531.600,00
Jumlah Penambahan		8.486.674.695,00
<u>B. Mutasi Pengurangan</u>		
1)	Transfer Keluar ke SKPD Lain	2.219.664.208,00
2)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	156.227.500,00
3)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	34.003.585.490,00
4)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	1.410.130.083,00
5)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 ke Beban Barang Tak Habis Pakai	6.720.000,00

6)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	681.160.000,00
7)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Barang Tak Habis Pakai	154.165.090,00
8)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Barang Pakai Habis (Persediaan)	4.247.526,00
Jumlah Pengurangan		38.635.899.897,00
Saldo Akhir		133.001.892.436,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.461.169.726,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial dengan rincian pada lampiran 3.
- 2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Donasi/Hibah dari luar Provinsi DKI sebesar Rp531.174.153,00 merupakan pendapatan hibah yang diperoleh Dinas Sosial dari pihak diluar Provinsi DKI Jakarta dengan rincian pada Lampiran 5.
- 3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Transfer Masuk dari SKPD lain sebesar Rp4.223.567.416,00 dengan rincian:

Tabel 4. 21
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Transfer Masuk

No	Nama Unit Kerja	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Dinas Sosial	<i>Micro Bus</i>	2	363.692.641,00	727.385.282,00
		<i>Micro Bus</i>	3	363.692.642,00	1.091.077.926,00
		<i>Pick Up</i>	1	114.600.000,00	114.600.000,00
2	PSAA Putra Utama 1	<i>Micro Bus</i>	1	363.692.642,00	363.692.642,00
3	PSAA Putra Utama 3	<i>Micro Bus</i>	1	363.692.641,00	363.692.641,00

No	Nama Unit Kerja	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
4	PSAA Balita Tunas Bangsa	Micro Bus	1	363,692,642.00	363,692,642.00
5	PSBI Bangun Daya 1	Micro Bus	1	363,692,642.00	363,692,642.00
6	PSBL Harapan Sentosa 2	Micro Bus	1	363,692,641.00	363,692,641.00
7	PSBL Harapan Sentosa 3	Tempat Tidur Besi	15	1,005,400.00	15,081,000.00
		Central Oxygen	3	11,520,000.00	34,560,000.00
8	UPK PPPJ	Pick Up	1	114,600,000.00	114,600,000.00
		P.C Unit	4	17,710,000.00	70,840,000.00
9	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	Tenda	2	43,240,000.00	86,480,000.00
		Tenda	2	32,000,000.00	64,000,000.00
10	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Tenda	2	43,240,000.00	86,480,000.00
Total					4,223,567,416.00

4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp98.231.800,00 dengan rincian:

Tabel 4. 22
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Reklas Antar Aset Tetap

No	Nama Unit Kerja	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Dinas Sosial	Pompa Pendorong	1	39.904.500,00	39.904.500,00
		Pompa Pendorong	1	30.095.000,00	30.095.000,00
2	PSBG Belaian Kasih	Microphone/Wireless Mic	1	2.510.500,00	2.510.500,00
3	PSBL Harapan Sentosa 2	Audio Amplifier	1	2.860.000,00	2.860.000,00
		Stand Keyboard	1	638.000,00	638.000,00
4	PSBL Harapan Sentosa 4	Microphone Floor Stand	2	410.600,00	821.200,00
		Audio Amplifier	1	5.096.600,00	5.096.600,00
		Microphone/Wireless Mic	1	2.510.500,00	2.510.500,00
5	Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari	Papan Nama Instansi	2	6.210.000,00	12.420.000,00
6	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur	Audio Mixing Portable	1	1.375.000	1.375.000
Total					98.231.300,00

5) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp160.000.000,00 dengan rincian:

Tabel 4. 23
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi
Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap

No	Nama Unit Kerja	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	PSBG Budi Bhakti 2	Mobil Ambulance	1	115,000,000,00	115,000,000,00
2	PSBL Harapan Sentosa 4	Pick Up	1	45,000,000,00	45,000,000,00
Total					160,000,000,00

6) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan Kapitalisasi dari Beban barang sebesar Rp12.531.600,00 pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 dengan rincian:

Tabel 4. 24
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Kapitalisasi dari Beban Barang

No	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Gerobak	2	3,679,000,00	7,358,000,00
2	Handy Talky (HT)	4	1,293,400,00	5,173,600,00
Total		6	4,972,400,00	12,531,600,00

b. Mutasi Pengurangan

1) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Transfer Keluar ke SKPD lain sebesar Rp2.219.664.208,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian:

Tabel 4. 25
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Transfer Keluar ke SKPD lain

No	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Micro Bus	3	363,692,642,00	1,091,077,926,00
	Micro Bus	2	363,692,641,00	727,385,282,00
2	Pick Up	1	114,600,000,00	114,600,000,00
3	Tempat Tidur Besi	15	1,005,400,00	15,081,000,00
4	Central Oxygen	3	11,520,000,00	34,560,000,00
5	Tenda	4	43,240,000,00	172,960,000,00
6	Tenda	2	32,000,000,00	64,000,000,00
Total				2,219,664,208,00

- 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp156.227.500,00 terdapat pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 26
Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin – Reklas antar Aset Tetap

No	Jenis Barang	Qty	Harga Satuan	Nilai Total
1	Kawar Duri Baja	1	156,227,500,00	156,227,500,00
Jumlah				156,227,500,00

- 3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp34.003.585.490,00 dengan rincian:

Tabel 4. 27
Pengurangan Peralatan dan Mesin – Reklas Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat

No	Nama Unit Kerja	Nilai Total
1	Dinas Sosial	2.192.206.445,00
2	PSAA Putra Utama 1	661.594.807,00
3	PSAA Putra Utama 2	1.591.950.335,00
4	PSAA Putra Utama 3	2.264.309.023,00
5	PSAA Balita Tunas Bangsa	731.417.215,00
6	PSBR Taruna Jaya 1	461.386.547,00
7	PSTW Budi Mulia 1	1.368.219.712,00
8	PSTW Budi Mulia 2	1.810.533.010,00
9	PSTW Budi Mulia 3	1.715.089.694,00
10	PSTW Budi Mulia 4	687.099.153,00
11	PSBI Bangun Daya 1	971.993.928,00
12	PSBI Bangun Daya 2	122.117.896,00
13	PSBD Budi Bhakti 1	915.302.612,00
14	PSBD Budi Bhakti 2	3.683.351.389,00
15	PSBNRW Cahaya Batin	552.192.571,00
16	PSBG Belaian Kasih	414.377.068,00
17	PSBL Harapan Sentosa 1	418.846.843,00
18	PSBL Harapan Sentosa 2	1.600.015.424,00
19	PSBL Harapan Sentosa 3	646.942.620,00
20	PSBL Harapan Sentosa 4	187.812.268,00
21	PSBK Harapan Jaya	918.410.756,00
22	PSBR Taruna Jaya 2	392.168.775,00
23	PSPBK Harapan Mulia	2.732.139.210,00
24	Sekretariat Masjid Raya K.H Hasyim Asy'ari	177.362.805,00
25	UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	144.700.651,00
26	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	162.224.000,00
27	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	626.868.130,00
28	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	2.290.897.010,00
29	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	1.035.848.030,00
30	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	959.931.258,00
31	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	1.566.276.305,00
Total		34.003.585.490,00

4) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
 atas reklasifikasi aset tetap menjadi aset
 dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan
 Status Aset adalah sebesar
 Rp1.410.130.083,00 dengan rincian:

Tabel 4. 28

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Aset
 Tetap menjadi Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan
 Status Aset

No	Nama Unit Kerja	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Dinas Sosial	Tempat Tidur Kayu	1	570.000,00	570.000,00
		Camera Film	1	5.000.000,00	5.000.000,00
		Camera Film	1	9.790.000,00	9.790.000,00
		Camera Film	1	9.857.500,00	9.857.500,00
		Handy Talky (HT)	7	13.497.800,00	94.484.600,00
		Handy Talky (HT)	4	6.590.500,00	26.362.000,00
		Mainframe (Komputer Jaringan)	2	34.100.000,00	68.200.000,00
		Mainframe (Komputer Jaringan)	1	28.600.000,00	28.600.000,00
		Internet	1	131.196.200,00	131.196.200,00
		Internet	1	3.850.000,00	3.850.000,00
2	PSBR Taruna Jaya 1	Mesin Las Listrik	9	4.235.000,00	38.115.000,00
		Staple Gun (Solid Material Handling Equipment)	1	777.000,00	777.000,00
		Mesin Hitung Listrik	1	5.280.000,00	5.280.000,00
3	PSTW Budi Mulia 3	Meja Rias	1	1.985.000,00	1.985.000,00
		Meja Rias	10	4.990.000,00	49.900.000,00
		Meja Rias	20	1.007.857,00	20.157.140,00
		Meja Rias	8	1.526.250,00	12.210.000,00
		Meja Rias	5	4.230.000,00	21.150.000,00
		Meja Rias	4	6.435.000,00	25.740.000,00
		Meja Rias	20	5.720.000,00	114.400.000,00
		Rice Cooker	3	725.000,00	2.175.000,00
		Ultrasonic Therapy Unit	6	1.995.000,00	11.970.000,00
		Ultrasonic Therapy Unit	2	1.980.000,00	3.960.000,00
4	PSBI Bangun Daya 1	Ultrasonic Therapy Unit	2	2.000.000,00	4.000.000,00
		Steam Cleaner	1	5.060.000,00	5.060.000,00
		Tongkat Pedel	1	25.052.500,00	25.052.500,00
		Lemari Es	1	2.379.300,00	2.379.300,00
		Camera Digital	1	5.999.400,00	5.999.400,00
		Camera Digital	1	8.500.000,00	8.500.000,00
		P.C Unit	1	10.751.000,00	10.751.000,00
		P.C Unit	2	10.000.000,00	20.000.000,00

No	Nama Unit Kerja	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
4	PSBI Bangun Daya 1	Laptop	2	18.370.000,00	36.740.000,00
		Note Book	1	16.500.000,00	16.500.000,00
		Note Book	1	12.045.000,00	12.045.000,00
		Note Book	2	7.150.000,00	14.300.000,00
		Printer	1	8.800.000,00	8.800.000,00
5	PSBL Harapan Sentosa 2	Lemari Penyimpanan	1	6.429.170,00	6.429.170,00
		Kursi Kayu	3	4.345.000,00	13.035.000,00
		Meja Rapat	1	7.480.000,00	7.480.000,00
		Tempat Tidur Kayu	26	5.162.630,00	134.228.380,00
		Meja Makan Kayu	5	1.810.000,00	9.050.000,00
		Meja Makan Kayu	5	2.499.200,00	12.496.000,00
		Meja Makan Kayu	2	1.999.910,00	3.999.820,00
6	PSBL Harapan Sentosa 4	Camera Digital	1	7.315.000,00	7.315.000,00
7	PSBK Harapan Jaya	Alat Pemadam/Portable	1	997.615,00	997.615,00
		Handy Cam	1	3.498.000,00	3.498.000,00
		Lap Top	1	5.709.000,00	5.709.000,00
		Lap Top	2	6.573.111,00	13.146.222,00
		Lap Top	2	7.452.500,00	14.905.000,00
		Lemari Kayu	92	1.075.000,00	98.900.000,00
		Lemari Kayu	7	2.010.250,00	14.071.750,00
		Lemari Kayu	2	2.145.000,00	4.290.000,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	500.000,00	500.000,00
		Meja Kerja Pejabatan Eselon V	4	1.500.000,00	6.000.000,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	500.000,00	1.500.000,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.000.000,00	2.000.000,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.484.166,00	2.484.166,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.484.170,00	2.484.170,00
		Meja Komputer	2	450.000,00	900.000,00
		Meja Sekolah	30	346.500,00	10.395.000,00
		Meja Tambahan	1	500.000,00	500.000,00
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	1	2.169.200,00	2.169.200,00
		Overhead Projector	1	59.675.000,00	59.675.000,00
		Papan Pengumuman	2	250.000,00	500.000,00

No	Nama Unit Kerja	Jenis Barang	Kuan titas	Harga Satuan	Nilai Total
7	PSBK Harapan Jaya	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	9,680,000,00	9,680,000,00
		Rak Besi	16	600,600,00	9,609,600,00
		Rak Besi	14	700,700,00	9,809,800,00
		White Board	2	2,662,000,00	5,324,000,00
8	PSBR Taruna Jaya 2	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1	3,503,500,00	3,503,500,00
		Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	2	3,008,500,00	6,017,000,00
		Ban Ukur	1	4,483,600,00	4,483,600,00
9	Sekretariat Masjid Raya K.H	Monopod	1	5,513,750,00	5,513,750,00
		Router	2	3,300,000,00	6,600,000,00
10	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	Rak Besi	2	2,497,000,00	4,994,000,00
		Camera Electronic	1	9,982,500,00	9,982,500,00
		Handy Talky (HT)	2	7,260,000,00	14,520,000,00
		Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	4,994,000,00	14,982,000,00
		Wireless	1	3,995,200,00	3,995,200,00
		Handy Talky (HT)	2	3,300,000,00	6,600,000,00
Total					1,410,130,083,00

5) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp6.720.000,00 terdapat pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3

6) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) sebesar Rp681.160.000,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 29
Pengurangan Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)

No	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Tenda Pleton	112	4,480,000,00	501,760,000,00
2	Tenda Pleton	40	4,485,000,00	179,400,000,00
Total				681,160,000,00

7) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp154.165.090,00 dengan rincian :

Tabel 4. 30
Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin – Reklas Aset Tetap ke Beban Barang Tak Habis Pakai

No	Nama Unit Kerja	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Dinas Sosial	Tenda	3	29,800,000,00	89,400,000,00
2	PSBG Belaian Kasih	Pompa Air	1	610,000,00	610,000,00
		Kursi Putar	1	349,600,00	349,600,00
		Kipas Angin	10	443,949,00	4,439,490,00
		Kipas Angin	2	454,900,00	909,800,00
		Kipas Angin	1	250,000,00	250,000,00
		Examination Table	1	3,200,000,00	3,200,000,00
		Lemari Obat	1	1,485,000,00	1,485,000,00
		Kasur Pasien	8	3,437,000,00	27,496,000,00
		Wheel Chair	7	3,000,000,00	21,000,000,00
		Alat Kukus	1	350,000,00	350,000,00
		Exhaust Fan	2	290,000,00	580,000,00
		Exhaust Fan	2	350,000,00	700,000,00
		Exhaust Fan	5	357,000,00	1,785,000,00
		Exhaust Fan	4	197,250,00	789,000,00
3	PSBL Harapan Sentosa 4	Microphone Floor Stand	2	410,600,00	821,200,00
Total					154,165,090,00

8) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Barang Pakai Habis (persediaan) sebesar Rp4.247.526,00 terdapat pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dengan rincian :

Tabel 4. 31
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Barang Pakai Habis

No	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Microphone Cable	5	499,500,00	2,497,500,00
2	TV Connector	49	35,000,00	1,715,000,00
3	TV Connector	1	35,026,00	35,026,00
Jumlah				4,247,526,00

4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.337.431.264.617,00 dan Rp1.300.020.765.271,00. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp116.464.723.228,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp79.054.223.882,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 32
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

A. Mutasi Penambahan		
1)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	40.112.964.343,00
2)	Transfer Masuk dari SKPD Lain	58.721.829.009,00
3)	Hutang Pihak Ke-3	551.725.831,00
4)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	156.227.500,00
5)	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	12.230.071.487,00
6)	Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap	1.763.098.644,00
7)	Kapitalisasi dari Beban Jasa	2.928.806.414,00
Jumlah Penambahan		116.464.723.228,00
B. Mutasi Pengurangan		
1)	Transfer Keluar ke SKPD Lain	58.249.189.009,00
2)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	2.195.791.393,00
3)	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2024 Ke KDP	7.853.667.391,00
4)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	2.189.483.348,00
5)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 ke Beban Pemeliharaan	834.066.400,00
6)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Jasa	163.938.350,00
7)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Pemeliharaan	1.265.696.984,00
8)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 ke Rekening Penampungan	1.055.000.859,00
9)	Belanja Modal Tahun 2024 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	143.495.131,00
10)	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	5.103.895.017,00
Jumlah Pengeluaran		79.054.223.882,00
Saldo Akhir		1.337.431.264.617,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp40.112.964.343,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial dengan rincian pada Lampiran 4.

2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Transfer Masuk dari SKPD lain sebesar Rp58.721.829.009,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial dengan rincian:

Tabel 4. 33
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Transfer
Masuk dari SKPD lain

No	Nama Unit Kerja	Jenis Aset	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Panti Sosial Tresna Wedha Budi Mulia 4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.226.282.605,00	2.226.282.605,00
		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	178.200.000,00	178.200.000,00
		Bangunan Gazebo	1	67.474.916,00	67.474.916,00
		Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	1	902.065.000,00	902.065.000,00
		Asrama Permanen	1	1.375.614.000,00	1.375.614.000,00
		Asrama Permanen	1	1.083.388.000,00	1.083.388.000,00
		Asrama Permanen	2	556.886.845,00	1.113.773.690,00
		Asrama Permanen	1	631.138.425,00	631.138.425,00
2	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	14.190.415.308,00	14.190.415.308,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	8.130.954.250,00	8.130.954.250,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	109.385.372,00	109.385.372,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	109.385.372,00	109.385.372,00
3	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.747.907.649,00	3.747.907.649,00
		Rumah Panel	1	1.369.757.709,00	1.369.757.709,00
		Bangunan Klinik/Puskesmas	1	459.726.469,00	459.726.469,00
		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	885.632.049,00	885.632.049,00
		Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	2.408.195.097,00	2.408.195.097,00
		Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	2.408.195.097,00	2.408.195.097,00

No	Nama Unit Kerja	Jenis Aset	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
3	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	402.019.874,00	402.019.874,00
		Gedung Pos Jaga Permanen	1	589.852.444,00	589.852.444,00
		Gedung Pos Jaga Permanen	2	91.878.259,00	183.756.518,00
		Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	590.734.510,00	590.734.510,00
		Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1.418.300.686,00	1.418.300.686,00
		Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	5	413.564.372,00	2.067.821.860,00
		Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	1	346.055.284,00	346.055.284,00
		Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	5	345.565.884,00	1.727.829.420,00
		Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	1	195.975.248,00	195.975.248,00
		Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	1	571.591.517,00	571.591.517,00
		Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	5	293.218.811,00	1.466.094.055,00
		Asrama Permanen	1	3.041.477.645,00	3.041.477.645,00
		Pagar Permanen	1	581.236.194,00	581.236.194,00
		Pagar Permanen	1	205.075.035,00	205.075.035,00
4	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	5.367.794.780,00	5.367.794.780,00
5	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	613.663.400,00	613.663.400,00
6	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	472.640.000,00	472.640.000,00
Total					58.721.829.009,00

- 3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Hutang Pihak ke-3 sebesar Rp551.725.831,00 merupakan utang atas pelaksanaan rehab berat Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia (PSTW) 4 Ciracas Tahun 2024 yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 34
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan -
Hutang Pihak Ke-3

No	Uraian	Nilai Total
1	Nilai Kontrak	1,426,885,000
2	Nilai realisasi pada Tahun 2024	717,203,000
3	Bobot Pekerjaan per 31 Desember 2024	88,93%
4	Nilai Pekerjaan per 31 Desember 2024	1,268,928,831
5	Nilai Utang per 31 Desember 2024	551,725,831

- 4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp156.227.500,00 terdapat pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 berupa kawat duri baja (pagar permanen).
- 5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas reklasifikasi ke-5 bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) senilai Rp12.230.071.487,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 35
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklas ke-5
Bidang Aset Tetap dari KDP

No	Nama Unit Kerja	Jenis Aset	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Dinas Sosial	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	11,965,191,487,00	11,965,191,487,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	97,460,000,00	97,460,000,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	35,420,000,00	35,420,000,00

No	Nama Unit Kerja	Jenis Aset	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
2	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	44,000,000,00	132,000,000,00
Total					12,230,071,487,00

6) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas reklasifikasi aset rusak berat menjadi aset tetap senilai Rp1.763.098.644,00 terdapat pada Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat dengan rincian :

Tabel 4. 36
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas reklasifikasi aset rusak berat menjadi aset tetap

No	Jenis Aset	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai Total
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	439,603,850,00	439,603,850,00
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	256,000,000,00	256,000,000,00
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	356,024,377,00	356,024,377,00
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	145,600,000,00	145,600,000,00
5	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	112,000,000,00	112,000,000,00
6	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	107,520,000,00	107,520,000,00
7	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	346,350,417,00	346,350,417,00
Jumlah				1,763,098,644,00

7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Kapitalisasi dari Beban Jasa senilai Rp2.928.806.414,00 terdapat pada Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat dengan rincian:

Tabel 4. 37
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Kapitalisasi dari Beban Jasa

No	Unit Kerja	Uraian	Nilai
1	Dinas Sosial	Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	231,400,312
		Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng	675,607,050
		Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	152,042,250
		Pembayaran Utang Rehab Total Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti Pondok Bambu	109,385,372
		Pemeliharaan Gedung A dan B Kantor Dinas Sosial	808,371,430

No	Unit Kerja	Uraian	Nilai
2	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	Pelaksanaan Rehab Gedung SKKT Kelurahan Duri Kepa	145,000,000,00
		Pelaksanaan Rehab Gedung SKKT Kelurahan Jembatan Lima	145,000,000,00
		Pelaksanaan Rehab Gedung SKKT Kelurahan Kamal	145,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Cengkareng Barat	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Cengkareng Timur	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Duri Kosambi	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Duri Utara	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Kalideres	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Kebon Jeruk Blok P	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Kemanggisan	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Kota Bambu Selatan	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Pegadungan	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Srengseng	47,000,000,00
		Perencanaan DED Gedung SKKT Kelurahan Sukabumi Utara	47,000,000,00
		Jumlah	2,928,806,414,00

b. Mutasi Pengurangan

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Transfer keluar ke SKPD lain sebesar Rp58.249.189.009,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial dengan rincian:

Tabel 4. 38
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Transfer keluar ke SKPD lain

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial	27.798.549.710,00
2	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	22.259.039.263,00
3	Panti Sosial Tresna Wedha Budi Mulia 1	7.577.936.636,00
4	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	613.663.400,00
Total		58.249.189.009,00

2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp2.195.791.393,00 terdapat pada

beberapa unit kerja dengan rincian:

Tabel 4. 39
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi antar Aset

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial	1.652.371.393,00
2	PSBL Harapan Sentosa 2	14.000.000,00
3	Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari	12.420.000,00
4	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	517.000.000,00
Total		2.195.791.393,00

3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 ke KDP senilai Rp7.853.667.391,00 merupakan pekerjaan rehab berat gedung Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng yang belum selesai pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 40
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan – Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 ke KDP

No	Uraian	Nilai
1	Perencanaan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng	27.300.450,00
2	Pengawasan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng	409.789.800,00
3	Pelaksanaan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng	7.416.577.141,00
Total		7.853.667.391,00

4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi aset tetap menjadi aset rusak berat senilai Rp2.189.483.348,00 terdapat pada beberapa unit kerja dengan rincian:

Tabel 4. 41
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan -
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat

No	Nama Unit Kerja	Jenis Aset	Nilai
1	PSTW Budi Mulia 3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	764,630,000
2	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan (Panti Pijat Tuna Netra)	68,880,000
3	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (SKKT Pademangan Barat)	1,075,000,000
4	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Selatan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (SKKT Gandaria Utara)	280,973,348
Total			2,189,483,348

5) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi belanja modal Tahun 2024 ke Beban Pemeliharaan senilai Rp834.066.400,00 terdapat pada Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Pusat berupa pengecatan gedung dan bangunan pertemuan permanen.

6) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi aset tetap (selain belanja modal 2024) ke beban jasa sebesar Rp163.938.350,00 terdapat pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 dan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 42
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi
Aset Tetap selain Belanja Modal 2024 ke Beban Jasa

No	Nama Unit Kerja	Jenis Aset	Nilai
1	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	122.063.600,00
2	UPK. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan Permanen	41.874.750,00
Total			163.938.350,00

7) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi aset tetap (selain belanja modal 2024) ke beban pemeliharaan sebesar Rp1.265.696.984,00 terdapat pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 dan Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih dengan rincian:

Tabel 4. 43
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi Aset Tetap selain Belanja Modal 2024 ke Beban Pemeliharaan

No	Nama Unit Kerja	Jenis Aset	Nilai
1	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	Asrama Permanen	1.097.126.054,00
2	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	Bangunan Gedung Kantor Permanen	168.570.930,00
Total			1.265.696.984,00

8) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 ke Rekening Penampungan senilai Rp1.055.000.859,00 merupakan nilai pengembalian atas penyesuaian pekerjaan rehab Dinas Sosial per 31 Desember 2024 dengan rincian:

Tabel 4. 44
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 ke Rekening Penampungan

Nama Unit Kerja	Nominal	Keterangan
Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung A dan B Dinas Sosial	44.312.000,00	Pengembalian atas penyesuaian nilai kontrak
Pembayaran Termin III Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4	733.402.000,00	Pengembalian karena pekerjaan tidak selesai sampai dengan batas akhir pembayaran (akan dibayarkan dengan mekanisme utang daerah)
Pembayaran Termin IV Pelaksanaan rehab berat gedung Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng	277.286.859,00	Penyesuaian nilai aset sesuai dengan bobot pekerjaan per 31 Desember 2024
Total	1.055.000.859,00	

9) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas pembayaran utang belanja modal yang telah diakui senilai Rp5.103.895.017,00 merupakan nilai atas pembayaran utang pekerjaan rehab Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 45
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Pembayaran Utang Belanja Modal yang telah diakui

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Kontrak	13,744,218,698
2	Nilai realisasi pada Tahun 2024	5,103,895,017
3	Bobot Pekerjaan dibayarkan pada Tahun 2024	37,13%

4.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.225.962.594,00 dan Rp2.968.370.094,00. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp439.055.500,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp181.463.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 46
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Awal		2,968,370,094
A. Mutasi Penambahan		
1)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	313,592,500.00
2)	Transfer Masuk dari SKPD Lain	111,463,000.00
3)	Reklasifikasi antar Aset Tetap	14,000,000.00
Jumlah Penambahan		439,055,500.00
B. Mutasi Pengurangan		
1)	Transfer Keluar ke SKPD Lain	111,463,000.00
2)	Reklasifikasi antar Aset Tetap	70,000,000.00
Jumlah Pengeluaran		181,463,000.00
Saldo Akhir		3,225,962,594.00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat disajikan sebagai berikut :

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 merupakan kegiatan Rehab Toilet Gedung A dan Gedung B Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta senilai Rp313.592.500,00.
- 2) Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari Transfer Masuk dari SKPD lain senilai Rp111.463.000,00 terdapat pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 dengan rincian:

Tabel 4. 47
Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi - Transfer Masuk dari SKPD lain

No	Nama Unit Kerja	Jenis Aset	Nilai
1	PSTW Budi Mulia 4	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	54.060.600
		Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	15.000.000
2	PSBL Harapan	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	42.402.400
Total			111.463.000

- 3) Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp14.000.000,00 terdapat pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK).

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang

berasal dari Transfer Keluar ke SKPD lain sebesar Rp111.463.000,00 terdapat pada beberapa unit kerja dengan rincian:

Tabel 4. 48
Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi - Transfer Keluar ke SKPD lain

No	Nama Unit Kerja	Jenis Aset	Nilai
1	PSBD Budi Bhakti 2	Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan	54.060.600
2	PSTW Budi Mulia 1	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	15.000.000
3	PSBK Harapan	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	42.402.400
Total			111.463.000

- 2) Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp70.000.000,00 merupakan Pompa Transfer pengerjaan rehab Toilet Gedung A dan B Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.641.394.120,00 dan Rp2.657.205.920,00. Selama tahun 2024 terdapat mutasi pengurangan pada Aset Tetap Lainnya senilai Rp15.811.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 49
Rincian Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	2.657.205.920
A. Mutasi Pengurangan	
1) Reklasifikasi Antar Aset Tetap	15.811.800,00
Jumlah Pengurangan	15.811.800,00
Saldo Akhir	2.641.394.120,00

Adapun rincian dari pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp15.811.800,00 terdapat pada beberapa unit kerja pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 50
Pengurangan Aset Tetap Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Tetap

No	Nama Unit Kerja	Uraian	Nilai
1	PSBG Belaian Kasih	Reklas antar Aset dari KIB E	2,510,500
2	PSBL Harapan Sentosa 2	Reklas antar Aset dari KIB E	3,498,000
3	PSBL Harapan Sentosa 4	Reklas antar Aset dari KIB E	8,428,300
4	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur	Reklas antar Aset dari KIB E	1,375,000
Total			15,811,800

4.2.1.2.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp11.301.308.534,00 dan Rp13.508.341.237,00. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan senilai Rp10.023.038.784,00 dan mutasi pengurangan senilai Rp12.230.071.487,00 pada Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 51
Rincian Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal		13.508.341.237
A. Mutasi Penambahan		
1)	Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.169.371.393,00
2)	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2024 Ke KDP	7.853.667.391,00
Jumlah Penambahan		10.023.038.784,00
B. Mutasi Pengurangan		
1)	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	12.230.071.487,00
Jumlah Pengeluaran		12.230.071.487,00
Saldo Akhir		11.301.308.534,00

Adapun rincian dari pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp2.169.371.393,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Adm. Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 52
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan - Reklasifikasi antar Aset Tetap

No	Nama Unit Kerja	Uraian	Nilai
1	Dinas Sosial	Termin I dan II Pelaksanaan Rehab Berat PSTW Budi Mulia 4	717.203.000
		Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Berat PSTW Budi Mulia 4	22.588.500
		Termin I Pembayaran Detail Engineering Design (DED) Pusdatin Kesejahteraan Sosial	99.171.562
		Termin II Pembayaran Detail Engineering Design (DED) Pusdatin Kesejahteraan Sosial	132.228.750
		Utang Pelaksanaan Rehab PSTW Budi Mulia 4	551.725.831
		Utang Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab PSTW Budi Mulia 4	129.453.750
2	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	Jasa Konsultansi Perencanaan SKKT	517.000.000
Total			2.169.371.393

- 2) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp7.853.667.391,00 merupakan pekerjaan rehab berat gedung Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng yang belum selesai pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 53
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan – Reklasifikasi
Belanja Modal Tahun 2024

No	Uraian	Nilai
1	Perencanaan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng	27,300,450.00
2	Pengawasan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng	409,789,800.00
3	Pelaksanaan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng	7,416,577,141.00
Total		7,853,667,391.00

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa reklasifikasi ke-5 bidang aset tetap senilai Rp12.230.071487,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Adm. Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 54
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan - Reklasifikasi ke-5
Bidang Aset Tetap

No	Nama Unit Kerja	Uraian	Nilai
1	Dinas Sosial	Pelaksanaan Rehab Gedung PSBI Bangun Daya 1 Cengkareng	132.880.000
		Pelaksanaan Rehab Gedung PSBD Budi Bhakti 1 Pondok	11.965.191.487
2	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	Jasa Konsultansi Perencanaan SKKT	132.000.000
Total			12.230.071.487

4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016

tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.520.611.319.088,00 dan Rp1.546.871.406.965,00 dengan pada tabel berikut :

Tabel 4. 55
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	969.183.921.364	-	969.183.921.364,00
Peralatan dan Mesin	163.151.117.638	(150.167.894.149,00)	12.983.223.489,00
Gedung dan Bangunan	1.300.020.765.271	(750.495.696.228,00)	549.525.069.043,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.968.370.094	(1.389.875.686,00)	1.578.494.408,00
Aset Tetap Lainnya	2.657.205.920	(2.564.848.496,00)	92.357.424,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.508.341.237	-	13.508.341.237,00
Jumlah	2.451.489.721.524,00	(904.618.314.559,00)	1.546.871.406.965,00

Tabel 4. 56
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	966.664.501.364	-	966.664.501.364,00
Peralatan dan Mesin	133.001.892.436	(121.902.355.448,00)	11.099.536.988,00
Gedung dan Bangunan	1.337.431.264.617	(807.641.509.752,00)	529.789.754.865,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.225.962.594	(1.553.229.681,00)	1.672.732.913,00
Aset Tetap Lainnya	2.641.394.120	(2.557.909.696,00)	83.484.424,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.301.308.534	-	11.301.308.534,00
Jumlah	2.454.266.323.665,00	(933.655.004.577,00)	1.520.611.319.088,00

4.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp76.580.471.535,00 dan Rp44.655.831.954,00 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp69.027.023.125,00) dan (Rp30.570.429.516,00), sehingga nilai buku aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.553.448.410,00 dan Rp14.085.402.438,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4. 57
Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Rusak Berat/Usang	66.977.369.978	35.250.440.480
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(61.600.007.688)	(24.553.233.362)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Perubahan Status Aset	9.603.101.557	8.192.971.474
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Perubahan Status Aset	(7.427.015.437)	(6.017.196.154)
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	1.212.420.000
Nilai Buku Aset Lainnya	7.553.448.410,00	14.085.402.438,00

Penjelasan mengenai Aset lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Aset rusak berat/usang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp66.977.369.978,00 dan Rp35.250.440.480,00. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp36.245.068.838,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp4.518.139.340,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 58
Rincian Mutasi Aset Lainnya – Aset Rusak Berat

Saldo Awal	35.250.440.480,00
A. Mutasi Penambahan	
1) Transfer Masuk dari SKPD Lain	52.000.000,00
2) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	36.193.068.838,00
Jumlah Penambahan	36.245.068.838,00
B. Mutasi Pengurangan	
1) Penghapusan	2.543.040.696,00
2) Transfer Keluar ke SKPD Lain	52.000.000,00
3) Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	1.923.098.644,00
Jumlah Pengurangan	4.518.139.340,00
Saldo Akhir	66.977.369.978,00

- 1) Penambahan aset rusak berat/usang dari transfer masuk dari SKPD lain senilai Rp52.000.000,00 terdapat pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4.
- 2) Penambahan aset rusak berat/usang dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp36.193.068.838,00 dengan rincian:

Tabel 4. 59
Penambahan Aset Rusak Berat/Usang - Reklasifikasi Aset Tetap

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial	2.192.206.445
2	PSAA Putra Utama 1	661.594.807
3	PSAA Putra Utama 2	1.591.950.335
4	PSAA Putra Utama 3	2.264.309.023
5	PSAA Balita Tunas Bangsa	731.417.215
6	PSBR Taruna Jaya 1	461.386.547
7	PSTW Budi Mulia 1	1.368.219.712
8	PSTW Budi Mulia 2	1.810.533.010
9	PSTW Budi Mulia 3	2.479.719.694
10	PSTW Budi Mulia 4	687.099.153
11	PSBI Bangun Daya 1	971.993.928
12	PSBI Bangun Daya 2	122.117.896
13	PSBD Budi Bhakti 1	915.302.612
14	PSBD Budi Bhakti 2	3.683.351.389
15	PSBNRW Cahaya Batin	552.192.571
16	PSBG Belaian Kasih	414.377.068
17	PSBL Harapan Sentosa 1	418.846.843
18	PSBL Harapan Sentosa 2	1.600.015.424
19	PSBL Harapan Sentosa 3	646.942.620
20	PSBL Harapan Sentosa 4	187.812.268

No	Nama Unit Kerja	Nilai
21	PSBK Harapan Jaya	918.410.756
22	PSBR Taruna Jaya 2	392.168.775
23	PSPBK Harapan Mulia	2.732.139.210
24	Sekretariat Masjid Raya K.H Hasyim Asy'ari	177.362.805
25	UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	144.700.651
26	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	231.104.000
27	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Pusat	626.868.130
28	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara	3.365.897.010
29	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	1.035.848.030
30	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Selatan	1.240.904.606
31	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur	1.566.276.305
Total		36.193.068.838

- 3) Pengurangan aset rusak berat/usang dari penghapusan senilai Rp2.543.040.696,00 dengan rincian:

Tabel 4. 60
Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang - Penghapusan

No	Nama Unit Kerja	Nominal
1	PSAA Balita Tunas Bangsa	945,450,699.00
2	PSBD Budi Bhakti 1	639,387,798.00
3	PSBD Budi Bhakti 2	353,593,254.00
4	PSBG Belaian Kasih	310,788,620.00
5	PSBR Taruna Jaya 2	261,920,025.00
6	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Pusat	31,900,300.00
Total		2,543,040,696.00

- 4) Pengurangan Aset rusak berat/usang dari transfer keluar ke SKPD lain senilai Rp52.000.000,00 terdapat pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1.
- 5) Pengurangan Aset rusak berat/usang dari Reklasifikasi aset rusak berat menjadi aset tetap sebesar Rp1.923.098.644,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 61
Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang – Reklasifikasi menjadi Aset Tetap

No	Nama Unit Kerja	Nominal
1	PSBD Budi Bhakti 2	115,000,000,00
2	PSBL Harapan Sentosa 4	45,000,000,00
3	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	1,763,098,644,00
Total		1,923,098,644,00

Nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp61.600.007.688,00) dan (Rp24.553.233.362,00).

Nilai buku aset rusak berat/usang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 62
Nilai Buku Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Harga Perolehan	66.977.369.978,00	35.250.440.480,00
Akumulasi Penyusutan	(61.600.007.688,00)	(24.553.233.362,00)
Nilai Buku per	5.377.362.290,00	10.697.207.118,00

- b. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.603.101.557,00 dan Rp8.192.971.474,00. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp1.410.130.083,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 63
Mutasi Penambahan - Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial	377,910,300
2	PSBR Taruna Jaya 1	44,172,000
3	PSTW Budi Mulia 3	267,647,140
4	PSBI Bangun Daya 1	166,127,200
5	PSBL Harapan Sentosa 2	186,718,370
6	PSBL Harapan Sentosa 4	7,315,000
7	PSBK Harapan Jaya	279,048,523
8	PSBR Taruna Jaya 2	14,004,100
9	Sekretariat Masjid Raya K.H Hasyim Asy'ari	12,113,750
10	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	55,073,700
Total		1,410,130,083

Nilai akumulasi penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31

Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp7.427.015.437,00) dan (Rp6.017.196.154,00). Nilai buku Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 64
Nilai buku Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Harga Perolehan	8,192,971,474,00	8,192,971,474,00
Akumulasi Penyusutan	(6,017,196,154,00)	(6,017,196,154,00)
Nilai Buku	2,175,775,320,00	2,175,775,320,00

- c. Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp1.212.420.000,00. Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 merupakan nilai penyaluran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang dilakukan setelah Tahun Anggaran 2023, 1 Januari 2024 sampai dengan 9 Januari 2024. Rincian kas yang dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 65
Rincian Penyaluran Bantuan Sosial yang Dilakukan setelah Tahun Anggaran

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kartu Anak Jakarta (KAJ)	-	18,000,000
2	Kartu Lansia Jakarta (KLJ)	-	1,136,820,000
3	Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)	-	57,600,000
Total		-	1,212,420,000

4.2.2. Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban pada neraca gabungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan saldo kewajiban jangka pendek berupa utang belanja. Saldo kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31

Desember 2023 masing-masing berjumlah Rp19.241.582.112,00 dan Rp20.567.266.892,00. Kewajiban jangka pendek Dinas Sosial merupakan Utang Belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 66
Rincian Utang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja	Rp 19.241.582.112	Rp 20.567.266.892
Jumlah		Rp 19.241.582.112	Rp 20.567.266.892

Penjelasan atas akun Utang adalah sebagai berikut:

4.2.2.1.1 Utang Belanja

Utang belanja Dinas Sosial merupakan utang atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 67
Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Pegawai	Rp 12.307.596.080	Rp 14.634.847.714
2	Utang Belanja Barang	Rp 165.906.250	Rp -
3	Utang Belanja Jasa	Rp 1.318.680.227	Rp 828.524.161
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 5.449.399.555	Rp 5.103.895.017
Jumlah		Rp 19.241.582.112	Rp 20.567.266.892

Penjelasan atas akun Utang Belanja adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang belum terbayarkan per 31 Desember 2024 senilai Rp12.307.596.080,00 adalah belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2024 senilai Rp312.208.241,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PPPK bulan Desember 2024 senilai Rp34.020.000,00.
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Desember 2024 senilai Rp11.678.812.839,00
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Plt. bulan Desember 2024 senilai Rp282.555.000,00
- b. Utang Belanja Barang
- Belanja Barang yang belum terbayarkan per 31 Desember 2024 merupakan utang atas pengadaan barang terkait penanganan bencana yang belum terbayarkan senilai Rp165.906.250,00.
- c. Utang Belanja Jasa
- Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.318.680.227,00 dan Rp828.524.161,00. Utang Belanja Jasa pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Utang Belanja Jasa TALI (Telepon, Air, Listrik dan Internet) dan Utang Belanja Jasa Non TALI (Telepon, Air, Listrik dan Internet) dengan rincian sebagai berikut:
- Utang Belanja TALI
- Saldo Utang Belanja Jasa TALI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp819.992.727,00 dan Rp817.988.749,00. Utang Belanja Jasa TALI pada Tahun 2024 merupakan saldo atas

pemakaian Telepon, Air, dan Listrik pada bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025. Berikut rincian nilai utang belanja jasa TALI pada Dinas Sosial dan UKPD dibawahnya :

Tabel 4. 68
Rincian Utang Belanja Jasa TALI

NO	SKPD/UKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Dinas Sosial	Rp 133.682.143,00	Rp 132.481.120,00
2	PSAA Putra Utama 1	Rp 10.167.490,00	Rp 8.682.753,00
3	PSAA Putra Utama 2	Rp 21.963.614,00	Rp 22.334.812,00
4	PSAA Putra Utama 3	Rp 16.776.402,00	Rp -
5	PSAA Balita Tunas Bangsa	Rp 30.967.138,00	Rp 31.354.363,00
6	PSBR Taruna Jaya 1	Rp 15.823.816,00	Rp 625.836,00
7	PSTW Budi Mulia 1	Rp 15.548.230,00	Rp 19.830.960,00
8	PSTW Budi Mulia 2	Rp 31.662.764,00	Rp 31.991.698,00
9	PSTW Budi Mulia 3	Rp 22.595.673,00	Rp 21.410.153,00
10	PSTW Budi Mulia 4	Rp 13.339.600,00	Rp 16.444.461,00
11	PSBI Bangun Daya 1	Rp 17.711.711,00	Rp 21.331.345,00
12	PSBI Bangun Daya 2	Rp 28.970.239,00	Rp -
13	PSBD Budi Bhakti 1	Rp 23.115.218,00	Rp -
14	PSBD Budi Bhakti 2	Rp 28.267.994,00	Rp 25.503.217,00
15	PSBN Cahaya Bathin	Rp 15.520.196,00	Rp 15.167.818,00
16	PSBG Belaian Kasih	Rp 27.211.728,00	Rp 12.240.563,00
17	PSBL Harapan Sentosa 1	Rp 14.028.603,00	Rp 16.224.617,00
18	PSBL Harapan Sentosa 2	Rp -	Rp 18.831.460,00
19	PSBL Harapan Sentosa 3	Rp 28.611.137,00	Rp 24.039.327,00
20	PSBL Harapan Sentosa 4	Rp 21.758.124,00	Rp 21.787.209,00
21	PSBK Harapan Jaya	Rp 8.119.645,00	Rp 7.405.761,00
22	PSBR Taruna Jaya 2	Rp 14.703.318,00	Rp 10.970.901,00
23	PSPBK Harapan Mulia	Rp 10.190.608,00	Rp 17.598.661,00
24	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'hari	Rp -	Rp 44.783.741,00
25	UPK PPPIJ	Rp 221.301.354,00	Rp 245.379.489,00
26	Pusdatin Kesejahteraan Sosial	Rp 246.812,00	Rp -
27	Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat	Rp 6.177.574,00	Rp 6.539.012,00
28	Suku Dinas Sosial Jakarta Utara	Rp 9.304.174,00	Rp 12.993.654,00
29	Suku Dinas Sosial Jakarta Barat	Rp 5.312.578,00	Rp 6.383.970,00
30	Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan	Rp -	Rp -
31	Suku Dinas Sosial Jakarta Timur	Rp 26.914.844,00	Rp 25.651.848,00
	JUMLAH	Rp 819.992.727,00	Rp 817.988.749,00

- Utang Belanja Non TALI

Saldo Utang Belanja Jasa Non TALI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp498.687.500,00 dan Rp10.535.412,00. Utang Belanja Jasa Non

TALI pada Dinas Sosial pada Tahun 2024 merupakan utang atas belanja jasa pada pekerjaan rehab gedung Dinas Sosial dan Panti Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 69
Utang jasa konsultansi pengawasan rehab berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas

No	Uraian	Nilai
1	Jasa Pemeliharaan Instalasi Air Gedung A dan B Dinas Sosial	20.000.000,00
2	Pengawasan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng	48.995.400,00
3	Pengawasan Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng	215.878.350,00
4	Perencanaan Pemeliharaan Instalasi Air Gedung A dan B Dinas Sosial	84.360.000,00
5	Pengawasan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	129.453.750,00
Total		498.687.500,00

Utang belanja jasa Non TALI Dinas Sosial pada Tahun 2023 merupakan saldo Utang atas tagihan BPJS Ketenagakerjaan Tim Reaksi Cepat (TRC) bulan Desember 2023 dan tambahan bobot pekerjaan pengawasan rehab Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Pondok Bambu tanggal 21 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 70
Rincian Utang Belanja Jasa Non TALI Tahun 2023

No	Utang Belanja Jasa Non TALI	31 Desember 2023
1	BPJS Kesehatan TRC bulan Desember 2023 (Dinas Sosial)	Rp 1,049,965
2	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Total PSBD Pondok Bambu (Tanggal 21 s.d 31 Desember 2023)	Rp 9,485,447
Jumlah		Rp 10,535,412

d. Utang Belanja Modal

Saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.449.399.555,00 dan Rp5.103.895.017,00. Utang belanja merupakan utang atas pelaksanaan rehab berat gedung Panti Sosial dan utang atas pengadaan belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 71
Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 704.735.800	Rp -
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 4.674.663.755	Rp 5.103.895.017
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 70.000.000	Rp -
Jumlah		Rp 5.449.399.555	Rp 5.103.895.017

Penjelasan atas akun Utang Belanja Modal adalah sebagai berikut:

- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Utang belanja peralatan dan mesin pada Dinas Sosial pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp704.735.800,00 dan Rp0,00. Utang belanja peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 merupakan utang atas pelaksanaan pemeliharaan gedung A dan B Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 72
Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai
Pembayaran Termin II Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung A dan B Dinas Sosial	610.796.500,00
Pembayaran Termin II Pengawasan Pemeliharaan Gedung A dan B Dinas Sosial	93.939.300,00
Total	704.735.800,00

- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Utang belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Sosial pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.674.663.755,00 dan Rp5.103.895.017,00. Utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 merupakan utang atas pelaksanaan rehab gedung Panti Sosial dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 73
Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Termin IV Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng	1.519.033.361,00
2	Pembayaran Termin III Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	551.725.831,00
3	Pembayaran Termin III dan Termin IV Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI)	2.603.904.563,00
Total		4.674.663.755,00

Utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 merupakan nilai pelaksanaan rehab gedung Panti Sosial Bina Daksa 1 Pondok Bambu Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 74
Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	Uraian	Utang Tahun 2023
1	Nilai Kontrak	13.744.218.698
2	Nilai realisasi pada Tahun 2024	6.386.821.583
3	Bobot Pekerjaan per 31 Desember 2024	83,60%
4	Nilai Pekerjaan per 31 Desember 2024	11.490.716.600
5	Nilai Utang per 31 Desember 2024	5.103.895.017

- Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas Sosial pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp70.000.000,00 dan Rp0,00. Utang belanja peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 merupakan utang atas belanja modal instalasi air kotor pekerjaan pemeliharaan gedung A dan B Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta senilai Rp70.000.000,00.

4.2.3 Ekuitas

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.533.657.875.849,00 dan Rp1.572.188.134.776,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Laporan Operasional

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Jajarannya Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

4.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah. Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp409.831.801,00 dan Rp629.296.705,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4. 75
Pendapatan LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	Pendapatan-LO	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	53.150.000,00	-
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah	510.438.153,00	629.296.705,00
Total		563.588.153,00	629.296.705,00

4.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Sosial pada Tahun 2024 adalah merupakan pendapatan retribusi atas penggunaan ruang unit pada kerja Dinas Sosial senilai Rp53.150.000,00. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 76
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	Pendapatan Retribusi Daerah	169.400.000	53.150.000	31,38%	-
	Penggunaan Ruang pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	49.400.000	21.650.000	43,83%	-
	Penggunaan Ruang pada Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari	120.000.000	31.500.000	26,25%	-

4.3.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan. Dalam hal hak atas pendapatan diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau direalisasi. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp 510.438.153,00 dan Rp629.296.705,00. Rincian Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada lampiran 5.

4.3.2 Beban

Beban disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Rekapitulasi Beban Gabungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.409.964.300.623,00 dan Rp1.586.339.497.123,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 77
Rekapitulasi Beban Dinas Sosial dan Jajaran

NO.	AKUN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
II	BEBAN		
	BEBAN OPERASI		
1	Beban Pegawai	239.486.400.810	230.797.868.932
3	Beban Barang	200.507.177.961	186.762.167.406
4	Beban Jasa	212.944.986.062	225.899.909.254
5	Beban Pemeliharaan	9.525.153.481	9.703.338.347
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.644.416.300	1.436.490.070
7	Beban Hibah	1.300.000.000	2.892.000.000
8	Beban Bantuan Sosial	671.984.890.000	868.466.512.775
9	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	58.571.276.009	60.381.210.339
	JUMLAH BEBAN	1.409.964.300.623	1.586.339.497.123

4.3.2.1 Beban Operasi

Beban operasi tahun 2024 dicatat berdasarkan nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji pegawai, tagihan pihak ketiga, nota perjanjian hibah, dan dokumen keputusan pemberian bantuan sosial.

Beban operasi per 31 Desember 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp1.351.393.024.614,00 dan Rp1.525.958.286.784,00 terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing masing sebesar Rp239.486.400.810,00 dan Rp230.797.868.932,00

Beban Pegawai per 31 Desember 2024 disajikan berdasarkan nilai belanja pegawai per 31 Desember 2024 ditambah dengan utang belanja pegawai per 31 Desember 2024 dan dikurangi utang belanja pegawai per 31 Desember 2023. Rincian perhitungan beban pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 78
Perhitungan Beban Pegawai per 31 Desember 2024

Nilai Belanja Pegawai pada LRA		241,813,652,444
Ditambah		
1)	Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	12,307,596,080.00
Jumlah Penambahan		12,307,596,080.00
Dikurang		
1)	Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023	14,634,847,714.00
Jumlah Pengurangan		14,634,847,714.00
Nilai Beban Pegawai		239,486,400,810.00

b. Beban Barang

Beban Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing masing sebesar Rp200.507.177.961,00 dan Rp186.762.167.406,00. Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap

pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama Tahun anggaran 2024. Nilai tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2024, pembelian atau perolehan persediaan selama Tahun 2024, persediaan akhir per 31 Desember 2024, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya. Rincian perhitungan beban barang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 79
Perhitungan Beban Barang per 31 Desember 2024

Nilai Belanja Barang pada LRA		201.409.258.192
Persediaan per 31 Desember 2023		18.335.495.287
Ditambah		
1)	Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2023	1.026.173.478,00
2)	Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	681.160.000,00
3)	Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Barang Persediaan	4.247.526,00
4)	Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel	124.303.890,00
5)	Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	3.299.555.250,00
6)	Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024	165.906.250,00
Jumlah Penambahan		5.301.346.394,00
Dikurang		
1)	Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-lain	12.531.600,00
2)	Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2024	2.359.150.153,00
Jumlah Pengurangan		2.371.681.753,00
Persediaan per 31 Desember 2024		22.167.240.158,00
Nilai Beban Barang		200.507.177.962,00

c. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing masing sebesar Rp212.944.986.062,00 dan Rp225.899.909.254,00. Beban jasa diantaranya terdiri dari gaji PJLP, sewa mesin fotocopy, dan tenaga ahli. Rincian perhitungan beban jasa per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 80
Perhitungan Beban Jasa per 31 Desember 2024

Nilai Belanja Jasa pada LRA		216.196.522,00
Ditambah		
1)	Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024	949.446.477,00
2)	Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023	8.733.606,00
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa	155.741.432,00
Jumlah Penambahan		1.113.921.515,00
Dikurang		
1)	Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023	828.524.161,00
2)	Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	35.332.200,00
3)	Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap	2.928.806.414,00
4)	Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	572.794.688,00
Jumlah Pengurangan		4.365.457.463,00
Nilai Beban Jasa		212.944.986.062,00

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing sebesar Rp9.525.153.481,00 dan Rp9.703.338.347,00. Beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 didapatkan dari realisasi belanja pemeliharaan diantaranya belanja pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, pemeliharaan komputer, pemeliharaan alat pendingin, dan pemeliharaan bangunan gedung. Rincian perhitungan beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 81
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024

Nilai Belanja Pemeliharaan pada LRA		7.577.147.592,00
Ditambah		
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	1.977.478.709,00
Jumlah Penambahan		1.977.478.709,00
Dikurang		
1)	Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	29.472.820,00
Jumlah Pengurangan		29.472.820,00
Nilai Beban Pemeliharaan		9.525.153.481,00

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing sebesar Rp15.644.416.300,00 dan Rp1.436.490.070,00.

f. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.300.000.000,00 dan Rp2.892.000.000,00.

g. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing sebesar Rp671.984.890.000,00 dan Rp868.466.512.775,00. Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 82
Rincian Belanja Bantuan Sosial

Nilai Belanja Bantuan Sosial pada LRA		670,772,470,000
<u>Ditambah</u>		
1)	Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024	1,212,420,000.00
Jumlah Penambahan		1,212,420,000.00
Nilai Beban Bantuan Sosial		671,984,890,000.00

4.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam

laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing masing sebesar Rp58.571.276.009,00 dan Rp60.381.210.339,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 83
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Peralatan dan Mesin	Rp 4.506.738.601	Rp 7.876.528.646
2	Gedung dan Bangunan	Rp 53.415.713.431	Rp 52.325.068.767
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 150.909.551	Rp 138.729.926
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 4.000.000	Rp 40.883.000
5	Aset Lainnya	Rp 493.914.426	Rp -
Jumlah		Rp 58.571.276.009	Rp 60.381.210.339

4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada tahun 2024. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.533.657.875.849,00 Rp1.572.188.134.776,00.

Tabel 4. 84
Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL		
Ekuitas - LO per 31 Desember 2023 dan 2022	16.749.003.371,00	19.486.287.604,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	1.543.010.941.511	1.549.574.081.437,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	-	-
Ekuitas - LO per 1 Januari 2023	1.559.759.944.882,00	1.569.060.369.041,00
RK PPKD		
RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 2022	1.555.439.131.405	1.563.663.362.171,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	(1.543.010.941.511,00)	(1.549.574.081.437,00)
RK PPKD per 1 Januari 2022 dan 2021	12.428.189.894,00	14.089.280.734,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	1.572.188.134.776,00	1.583.149.649.775,00
PERUBAHAN EKUITAS		
- SURPLUS/DEFISIT LO	(1.409.400.712.470,00)	(1.585.710.200.418,00)
- Mutasi RK PPKD	1.382.545.441.442,00	1.541.349.850.671,00
- KOREKSI EKUITAS	(11.674.987.899,00)	33.398.834.748,00
JUMLAH PERUBAHAN EKUITAS	(38.530.258.927,00)	(10.961.514.999,00)
EKUITAS AKHIR		
- EKUITAS - LO	138.684.244.513,00	16.749.003.371,00
- RK PPKD	1.394.973.631.336,00	1.555.439.131.405,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	1.533.657.875.849,00	1.572.188.134.776,00

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal per 1 Januari 2024 adalah Rp1.572.188.134.776,00

b. Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp38.530.258.927,00) yang terdiri dari :

a. Defisit LO sebesar Rp1.409.400.712.470,00

b. Mutasi RK PPKD sebesar Rp1.382.545.441.442,00

c. Koreksi Ekuitas sebesar (Rp11.674.987.899,00)

c. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir 31 Desember 2024 adalah

Rp1.533.657.875.849,00



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri dari
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subkelompok Program dan Pelaporan
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1) Subkelompok Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2) Subkelompok Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3) Subkelompok Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Subkelompok Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Kelembagaan Masyarakat
 - 2) Subkelompok Pemberdayaan Peran Serta Dunia Usaha dan Bina Undian
 - 3) Subkelompok Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Subkelompok Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 2) Subkelompok Jaminan Sosial Keluarga
 - 3) Subkelompok Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- e. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kerja Sama Antar Lembaga
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana Sosial
 - 3) Subkelompok Penanganan Fakir Miskin

- f. Suku Dinas Kota Administrasi, terdiri dari :
- 1) Subbagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial
 - 3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
- g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
- 1) Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 4) Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 5) Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 6) Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 7) Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 8) Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 9) Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 10) Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 11) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 12) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, yang terdiri dari:

5.2 Visi dan Misi

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Visi yaitu Masyarakat Jakarta yang mandiri dan Sejahtera. Sementara Misi yang diemban oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan harkat, martabat serta kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
3. Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi masalah sosial.
4. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan sosial masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
6. Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial.
7. Mengembangkan sistem dan sarana serta prasarana UKS

5.3 Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial;
2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Sosial;
4. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
5. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;

7. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;
8. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang sosial;
9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang sosial;
10. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;
11. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang sosial;
12. pengembangan peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial dan penggalangan peran aktif serta kemitraan masyarakat dan dunia usaha;
13. pengelolaan panti sosial;
14. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Masjid milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial;
16. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang sosial;
17. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana sosial;
18. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial;
19. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
20. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD

Tujuan Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif. Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 2. Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

5.5 Target Kinerja Strategis SKPD

Target Kinerja Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1
Target Kinerja Strategis Dinas Sosial Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target TW 1	Target TW 2	Target TW 3	Target TW 4	Realisasi TW 4	Target Tahunan	Satuan	Capaian	Nilai Kinerja Perangkat Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)		(7)	(8)	(14)
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Dasar Hukum : a. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial c. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi : Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.	N/A	4	N/A	4	4	4	Indeks	100.00%	100.00%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target TW 1	Target TW 2	Target TW 3	Target TW 4	Realisasi TW 4	Target Tahunan	Satuan	Capaian	Nilai Kinerja Perangkat Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)		(7)	(8)	(14)
				Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan dengan mekanisme survei disesuaikan dengan kondisi PPKS yang diukur dengan tujuan memulihkan fungsi sosialnya. Dua unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diukur adalah (1) Layanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan (2) Layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kedua unsur ini diukur tingkat kepuasannya melalui survei elektronik dengan unsur SKM sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu : a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi jenis pelayanan; f. Kompetensi pelaksana; g. Perilaku pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan/atau i. Sarana dan Prasarana. Metode Pengukuran : Survei Kepuasan terhadap Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan nilai persepsi sesuai Permenpan 14 Tahun 2017 yaitu : a. Nilai 1= 25,00 - 64,99 (tidak baik); b. Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik); c. Nilai 3 = 76,61 - 88,30 (baik); d. Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik) Sumber Data : Perhitungan Mandiri									

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target TW 1	Target TW 2	Target TW 3	Target TW 4	Realisasi TW 4	Target Tahunan	Satuan	Capaian	Nilai Kinerja Perangkat Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)		(7)	(8)	(14)
2		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Dasar Hukum : a. Permessos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi : Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kessos. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang termasuk dalam : a. Tenaga kesejahteraan sosial ; b. Pekerja sosial profesional ; c. Relawan sosial ; dan d. Penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (ii) Pekerja Sosial Masyarakat; (iii) Karang Taruna; (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial; (v) Taruna Siaga Bencana; dan (vi) Pelopor Perdamaian. Metode Pengukuran : Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial = $(1/n \times (i1 + i2 + i3 + i4))$. n = jumlah jenis SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan. i = capaian masing-masing SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Sumber Data : Perhitungan Mandiri	N/A	0.3	0.7	0.89	0.9	0.89	Indeks	101.12%	101.12%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target TW 1	Target TW 2	Target TW 3	Target TW 4	Realisasi TW 4	Target Tahunan	Satuan	Capaian	Nilai Kinerja Perangkat Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)		(7)	(8)	(14)
3		Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Berfungsi Sosial	Dasar Hukum : a. Permensos Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial b. Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial c. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PPKS pada Permensos Nomor 12 Tahun 2008, dengan jenis PPKS yang diberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu antara lain: (i) Anak terlantar, (ii) Penyandang Disabilitas, (iii) Lanjut Usia Terlantar, (iv) Gelandangan, (v) Wanita Tuna Susila, (vi) Korban Tindak Kekerasan, (vii) Fakir Miskin, (viii) Korban Bencana Alam, (ix) Korban Bencana Sosial, dan (x) Pengemis. Kebutuhan layanan kesejahteraan sosial PPKS diidentifikasi melalui pendataan PPKS di dalam panti maupun di luar panti yang dilayani oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.	N/A	70	N/A	100	100	100	Persen	100.00%	100.00%
				Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial PPKS diidentifikasi dari tiga dimensi yaitu (1) terpenuhi kebutuhan dan hak dasar dan (2) dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya dan/atau (3) masalah dalam kehidupannya dapat teratasi, sesuai dengan kategori PPKS. Metode Pengukuran : Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial dibagi dengan Jumlah PPKS yang Tersdata x 100% Sumber Data : Perhitungan Mandiri									
Capaian Kinerja Perangkat Daerah													
Predikat Kinerja													
													100.37%
													Mencapai Target

5.6 Mekanisme Pembayaran Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 31/SE/2024 tentang Pedoman Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 33/SE/2024 tentang Pembayaran Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 Tanggal 16 Desember 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan mekanisme pembayaran menggunakan Rekening Penampungan Batas Akhir Tahun Anggaran pada Tahun 2024. Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat RPBATA adalah rekening khusus milik BUD untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan SPM kepada Kuasa BUD sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2024 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tahun anggaran 2024 dan diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran 2025. Pembayaran menggunakan RPBATA dijelaskan sebagai berikut:

- Mekanisme RPBATA diterapkan untuk pekerjaan Kontraktual umum yang serah terima pekerjaannya melalui BAST pada tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, maka pengajuan SPM-LS kontraktual ke SBPKD diajukan sebesar nilai kontrak dengan memperhitungkan penyelesaian uang muka dan/atau pembayaran tagihan/termin sebelumnya.
- Untuk melaksanakan pembayaran pekerjaan pada akhir tahun anggaran, PA/KPA/PPK menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, di antara batas akhir pengajuan SPM-LS Kontraktual kepada Kuasa BUD sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2024, sebagai dasar perhitungan

potongan jaminan pembayaran melalui RPBATA.

- Atas sisa pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut dihitung sebagai nilai potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS kontraktual.
- Potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS kontraktual sebagaimana dimaksud ditampung dalam RPBATA yang dikelola oleh SBPKD selaku Kuasa BUD sesuai lingkup wilayah kerjanya.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menerapkan mekanisme pembayaran menggunakan RPBATA untuk pembayaran pelaksanaan gedung dan jasa konsultasi rehab gedung dengan rincian pada Lampiran 6.

Pembayaran pekerjaan menggunakan RPBATA diakui sebagai utang belanja pada Laporan Keuangan 31 Desember 2024.

5.7 Pembayaran Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu

Pada Tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki utang atas pekerjaan rehabilitasi total Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu yang pengerjaannya melewati Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 2
Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu

Uraian	Nilai
a. Nilai Kontrak	13,744,218,698
b. Nilai realisasi pada Tahun 2023	6,386,821,583
c. Pemotongan Pembayaran (berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK 2023)	722,181,556
d. Sisa Pekerjaan yang menjadi Utang pada Tahun 2024 (a-b-c)	6,635,215,559

Sisa Pekerjaan rehabilitasi total Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu yang dibayarkan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.635.215.559,00 dari nilai kontrak Rp13.744.218.698,00 dikurangi pembayaran yang sudah dilakukan pada Tahun 2023 sebesar Rp6.386.821.583,00 dan dikurangi pemotongan pembayaran atas hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp722.181.556,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 3
Hasil Pemeriksaan BPK - Pemotongan Pembayaran Utang Belanja Modal Panti Sosial Bina Daksa
Budi Bhakti 1 Pondok Bambu

No	Uraian	Nilai
1	Kurang Volume Pekerjaan	7.130.100
2	Koreksi Harga Timpang	6.148.176
3	Tiang Telkom	15.000.000
4	Denda Keterlambatan	693.903.279
Total		722.181.555



BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya per 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Ikhtisar Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan per 31 Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp169.400.000,00. Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp53.150.000,00 atau sebesar 31,38%. Anggaran Belanja per 31 Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp1.460.713.417.027,00. Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.398.601.193.107,00 atau sebesar 95,75%. Sehingga posisi SiKPA per 31 Desember 2024 tercatat sebesar (Rp1.398.548.043.107,00.)
2. Berdasarkan Laporan Operasional per 31 Desember 2024 terdapat Pendapatan dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh UKPD dan UPT memperoleh Pendapatan Retribusi sebesar Rp53.150.000,00 dan Pendapatan Hibah

sebesar Rp510.438.153,00. Beban sebesar Rp1.409.253.463.974,00, dan surplus/defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar(Rp1.408.689.875.821,00).

3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp1.572.188.134.776,00, defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.408.689.875.821,00), Mutasi RK PPKD Rp1.389.440.144.463,00 dan koreksi Ekuitas sebesar (Rp3.226.957.166,00) sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp1.549.711.446.252,00
4. Neraca Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp1.563.686.120.890,00, Kewajiban sebesar Rp13.974.674.638,00, dan Ekuitas sebesar Rp1.549.711.446.252,00

Demikian Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Jakarta, 23 Mei 2025

Kepala Dinas Sosial

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Iqbal Akbarudin
NIP 197301151998031003

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya per 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Ikhtisar Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan per 31 Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp169.400.000,00. Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp53.150.000,00 atau sebesar 31,38%. Anggaran Belanja per 31 Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp1.460.713.417.027,00. Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.398.601.193.107,00 atau sebesar 95,75%. Sehingga posisi SiKPA per 31 Desember 2024 tercatat sebesar (Rp1.398.548.043.107,00.)
2. Berdasarkan Laporan Operasional per 31 Desember 2024 terdapat Pendapatan dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh UKPD dan UPT memperoleh Pendapatan Retribusi sebesar Rp53.150.000,00 dan Pendapatan Hibah

sebesar Rp510.438.153,00. Beban sebesar Rp1.409.253.463.974,00, dan surplus/defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar(Rp1.408.689.875.821,00).

3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp1.572.188.134.776,00, defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.408.689.875.821,00), Mutasi RK PPKD Rp1.389.440.144.463,00 dan koreksi Ekuitas sebesar (Rp3.226.957.166,00) sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp1.549.711.446.252,00
4. Neraca Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp1.563.686.120.890,00, Kewajiban sebesar Rp13.974.674.638,00, dan Ekuitas sebesar Rp1.549.711.446.252,00

Demikian Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Jakarta, 23 Mei 2025
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Iqbal Akbarudin
NIP 197301151998031003



LAMPIRAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2024 *AUDITED*

Lampiran 1 : Rincian Realisasi Belanja Hibah Per 31 Desember 2024

No	Nama Yayasan/Lembaga Penerima Hibah	Nilai Hibah	Realisasi per 31 Desember 2024
1	Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta	200.000.000,00	200.000.000,00
2	Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia (PPKI)	25.000.000,00	25.000.000,00
3	Yayasan Darul Fikri Pratama	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Forum Komunikasi Lansia Jakarta	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Yayasan Hajjah Andi Hasnah Noor	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Bunda Pintar Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00
7	Yayasan Nurul Barkah Insani	25.000.000,00	25.000.000,00
8	Yayasan Miftahul Huda Cengkareng	25.000.000,00	25.000.000,00
9	Yayasan Sahabat Indonesia Madani	25.000.000,00	25.000.000,00
10	Yayasan Al Muttaqin An Nursyahim	25.000.000,00	25.000.000,00
11	Yayasan Kuntum Teratai	50.000.000,00	50.000.000,00
12	Forum Komunikasi Pusaka Provinsi DKI Jakarta	50.000.000,00	50.000.000,00
13	Forum Koordinasi TAGANA Provinsi DKI Jakarta	100.000.000,00	100.000.000,00
14	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00
15	Al Hidayah Assuaidiyah Pondok Kopi	25.000.000,00	25.000.000,00
16	Yayasan Pulo Kambing	25.000.000,00	25.000.000,00
17	Yayasan Esa Sasana Surya	25.000.000,00	25.000.000,00
18	Yayasan An-Najm Anak Prestasi Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00
19	Yayasan Al-Madani Nabawi Basmol	25.000.000,00	25.000.000,00
20	Yayasan Amal Mulia Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00
21	Yayasan Yatim Dan Dhuafa Al Ausathiyah	25.000.000,00	-
22	Faturohman Surdja Hada	25.000.000,00	25.000.000,00
23	Yayasan Alhasanat Jaya	25.000.000,00	25.000.000,00
24	Yayasan Al-Husaini Pesanggrahan	25.000.000,00	25.000.000,00
25	Yayasan Kurnia Jakarta	25.000.000,00	25.000.000,00
26	Yayasan Helmida	25.000.000,00	25.000.000,00
27	Yayasan Putri Assholihah Pondok Jaya	25.000.000,00	25.000.000,00
28	Yayasan Rah Fatahillah	25.000.000,00	25.000.000,00
29	Yayasan Putra Putri Indonesia Bahagia Cempaka Putih	25.000.000,00	25.000.000,00
30	Yayasan Sos Desa Taruna Indonesia Perwakilan Jakarta	25.000.000,00	25.000.000,00
31	Yayasan Pusaka Empat Lima	25.000.000,00	25.000.000,00
32	Yayasan Olan Generasi Abdi Bangsa	25.000.000,00	25.000.000,00
33	Yayasan Amal Wanita	25.000.000,00	25.000.000,00
34	Yayasan Al Ilhamusolihin	25.000.000,00	25.000.000,00
35	Yayasan Masjid Al Barkah Kodamar	25.000.000,00	25.000.000,00
	Total	1.325.000.000,00	1.300.000.000,00

Lampiran 2 : Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar per 31 Desember 2024

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi (SP2D)			Sisa Anggaran	% Realisasi	Penyaluran Tahun 2024		
			Penerima Bansos	Biaya Admin	Total Realisasi (SP2D)			Bansos ke penerima	Biaya Admin	% Realisasi penyaluran
1	2	4	5	6	7 = 5+6	8 = 4-7	9 = 7:4	10	11	12 = 10:5
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	690,810,360,000	657,517,400,000	8,987,165,000	666,504,565,000	24,305,795,000	96.48%	652,943,400,000	8,987,160,000	99.30%
	Jumlah	690,810,360,000	657,517,400,000	8,987,165,000	666,504,565,000	24,305,795,000	96.48%	652,943,400,000	8,987,160,000	99.30%

Lampiran 3 : Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

Nama Unit Kerja	Kegiatan	APBD	Realisasi s.d 31 Desember 2024	%
Dinas Sosial	Pengadaan Genset Gedung Beserta Kelengkapannya Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	2,266,176,000.00	-	0.00%
Dinas Sosial	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1,784,999,980.00	1,778,750,000.00	99.65%
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87,336,190.00	83,807,000.00	95.96%
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	Pemeliharaan sarana dan prasarana elektrik Pantl Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	13,153,500.00	12,890,430.00	98.00%
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	Pengadaan Mebel Sasana Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu	16,372,500.00	16,045,050.00	98.00%
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sasana Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu	32,778,190.00	32,122,625.00	98.00%
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	Penyediaan Alat Bantu Jalan bagi Warga Binaan Sosial (WBS) Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti	-	-	0.00%
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	9,780,229.00	9,486,000.00	96.99%
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Sasana Bina Daksa Budi Bhakti 1 Pondok Bambu	3,818,722.00	3,742,347.00	98.00%
Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	Pemberian Bimbingan Keterampilan bagi Warga Binaan Sosial PSBR Taruna Jaya 2	22,724,483.00	22,600,000.00	99.45%
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Asrama/Wisma PSTW Budi Mulia 4	163,108,007.00	-	0.00%
Sekretariat Masjid Raya Kh Hasyim Asy'Ari	Pengadaan Sarana dan Prasarana Elektrikal	1,196,208,674.00	1,196,018,784.00	99.98%
Sekretariat Masjid Raya Kh Hasyim Asy'Ari	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penunjang Petugas Keamanan	12,934,908.00	12,932,000.00	99.98%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304,294,815.00	292,775,490.00	96.21%
Total		5,913,686,198.00	3,461,169,726.00	58.53%

Lampiran 4 : Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

Nama Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Dinas Sosial	Pembayaran Utang Rehab Total Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti Pondok Bambu	6.635.215.559	7.329.118.838	110,46%
Dinas Sosial	Pemeliharaan Gedung A dan B Kantor Dinas Sosial	1.947.831.227	1.776.847.570	91,22%
Dinas Sosial	Pemeliharaan Lobby Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	521.256.000	-	0,00%
Dinas Sosial	Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng	9.018.422.550	7.693.864.000	85,31%
Dinas Sosial	Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	1.840.685.250	1.450.605.000	78,81%
Dinas Sosial	Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng	5.434.093.800	5.037.175.187	92,70%
Sekretariat Masjid Raya Kh Hasyim Asy'Ari	Pengadaan Sarana dan Prasarana Elektrikal	12.424.860	12.420.000	99,96%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	Pelaksanaan Rehab Gedung SKKT Kelurahan Duri Kepa	1.006.170.600	988.026.319	98,20%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	Pelaksanaan Rehab Gedung SKKT Kelurahan Jembatan Lima	964.934.100	956.757.616	99,15%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	Pelaksanaan Rehab Gedung SKKT Kelurahan Kamal	701.020.500	693.772.507	98,97%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.221.570.000	2.101.728.018	94,61%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rehab Gedung SKKT Kelurahan Jagakarsa II	841.224.600	837.675.377	99,58%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rehab Gedung SKKT Kelurahan Kebon Baru	1.797.911.400	1.727.535.740	96,09%

Nama Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rehab Gedung SKKT Kelurahan Lenteng Agung	915.450.300	899.147.740	98,22%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rehab Gedung SKKT Kelurahan Menteng Atas	882.461.100	809.971.332	91,79%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rehab Gedung SKKT Kelurahan Ulujami	1.129.880.100	1.042.802.056	92,29%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Rehabilitasi Gedung SKKT Kelurahan Cipayung	1.726.660.500	1.312.189.934	76,00%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Rehabilitasi Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Besar Utara	1.205.404.500	1.057.500.000	87,73%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Rehabilitasi Gedung SKKT Kelurahan Duren Sawit	1.870.005.900	1.706.993.657	91,28%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Rehabilitasi Gedung SKKT Kelurahan Malaka Sari	1.531.189.500	1.314.205.522	85,83%
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Rehabilitasi Gedung SKKT Kelurahan Pekayon	1.459.516.800	1.364.627.930	93,50%
Total		43.663.329.146	40.112.964.343	91,87%

Lampiran 5 : Pendapatan Hibah-LO

No	Pihak Pemberi Hibah	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai
1. Dinas Sosial					13.824.000
	Rumah Sakit Soeharto Herdjan	Oxygen Concentrator	3	4.608.000	13.824.000
2. PSAA Putra Utama 1					111.308.400
	Royale Jakarta Golf Club	Mesin Cuci Merk Aqua Tipe AQW 781 (7Kg) 2 Tabung	1	1.400.000	1.400.000
	Royale Jakarta Golf Club	Air Conditioner (AC) Merk Sharp tipe 185 AY (2PK)	4	6.335.000	25.340.000
	Royale Jakarta Golf Club	Smart TV LED Coocaa 50 Inch 34 Pro	3	3.800.000	11.400.000
	Bank Indonesia	AC Split Merk Sharp AH-A9BEY (1 PK)	6	5.934.400	35.606.400
	Bank Indonesia	Lap top Lenovo Idea Pad Slim 3 14IRH8 Core i7-1360H 16GB 512GB W11 OHS	2	12.999.000	25.998.000
	Bank Indonesia	Printer (Peralatan Personal Komputer) Merk Epson tipe L3210	1	2.835.000	2.835.000
	Bank Indonesia	LCD Projector/Infocus Merk Infocus tipe IN2115	1	6.979.000	6.979.000
	Bank Indonesia	Focusing Screen/Layar LCD Projector(Screen Projector Wall 81 Inch)	1	1.750.000	1.750.000
3. PSAA Putra Utama 3					48.076.875
	Bank Indonesia	Asus Vivobook 14 A1400KA N4500 8GB 256GB SSD W1 1+OHS 14" FHD - Trans Silver	3	6.243.750	18.731.250
	Bank Indonesia	Yamaha Ck61 Ck 61 Key Stage Keyboard/Piano OrganSynth	1	18.731.250	18.731.250
	Bank Indonesia	Sound Sysrem Hardwell Mark 8 8 Channel mcpro 2 bh baretone Max 15rae 15 inchi original	1	10.614.375	10.614.375
4. PSBG Belaian Kasih					144.228.636
	Vihara Padma Graha	Tempat Sampah	1	5.000.000	5.000.000
	Vihara Padma Graha	Exhaust Fan	5	357.000	1.785.000
	PT MMS Group	Exhaust Fan	4	197.250	789.000
	Bapak Sutiono	Kipas Angin	10	443.949	4.439.490
	Bapak Ko Amin	Kipas Angin	2	454.900	909.800
	Hamba Allah	Kipas Angin	1	570.000	570.000
	Bapak Arifin	Exhaust Fan	2	350.000	700.000
	Rombongan Bepi	Kursi Roda	7	3.000.000	21.000.000
	Bapak Darwo	Kipas Angin Dinding	1	250.000	250.000
	Bapak Darwo	Exhaust Fan	2	290.000	580.000
	Ibu Irma	Alat Kukus	1	350.000	350.000
	Ibu Wendy	Pompa Air	1	610.000	610.000
	Ibu Irma	Pompa Air	1	1.775.000	1.775.000
	Bapak Darwo	Mesin Jilid	1	4.068.000	4.068.000
	Bapak Bram	Kulkas (Aqua) 2 pintu	1	2.700.000	2.700.000
	PT. SNG Kelapa Gading	Meja Medis Stainless	1	810.000	810.000
	Group Baksos Yang Guang	TV LED (COOCAA 43')	2	2.727.000	5.454.000
	Bapak Jon Hartono	Meja makan Besi	2	1.250.000	2.500.000
	Ibu Elisha	Meja makan Besi	3	1.250.000	3.750.000
	Ibu Veny	Televisi LED (Sharp 43 inc LC40LE1851)	1	4.500.000	4.500.000
	Ibu Veny	Televisi LED (Sony 34 inc KLU 40R452A)	1	5.849.000	5.849.000
	Ibu Veny	Televisi LED (Samsung 43 inc UA40J5100)	1	4.100.000	4.100.000
	Ibu Yati	Meja Makan Besi	3	1.250.000	3.750.000
	Ibu Lieka	AC Denpoo (DDS_09 CTL)	3	3.090.000	9.270.000
	Ibu Elisa	AC Polytron (DPAC 09 VH)	1	3.500.000	3.500.000
	Ibu Leli	AC Polytron (PAC 09vh)	3	3.450.000	10.350.000
	KEJARI	Kipas Angin Embun (Regency Ternando)	2	1.876.573	3.753.146
	Bapak Darwo	TV LED (Sharp 32 Inc 2T-C32GD15001)	2	1.800.000	3.600.000
	KEJARI	Tempat Tidur (Sella Hospital Bed KY 105S)	8	3.437.000	27.496.000
	Ibu Triwani	Alat Sterilisasi (Sterilisator) lemari obat 2 pintu	1	1.485.000	1.485.000
	Bapak Ramli /Ibu Robiah	Mesin Cuci (Hisense WSRB 1313UB)	1	2.643.000	2.643.000
	Bapak Heri Bali	Kursi Donor Darah	1	3.200.000	3.200.000
	Ibu Lely	Kursi Medis Putar	1	349.600	349.600
	Ibu Velisiti	Dandang Stainless	1	607.600	607.600
	Ibu Mira	Led TV (Polytron 32 inc PLD32V1853)	1	1.735.000	1.735.000

No	Pihak Pemberi Hibah	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai
5. PSBI Bangun Daya 2					39.243.890
	Bank Indonesia	Asus All in one pc	1	13.573.890	13.573.890
	Bank Indonesia	Panasonic AC CS/CU-YN18 WKJ (2pk split)	2	7.835.000	15.670.000
	Bank Indonesia	Panasonic AC CS/Cu-pn9WKJ (1 pk split)	2	5.000.000	10.000.000
6 Sekretariat Masjid Raya K.H Hasyim Asy'ari					153.756.352
	Bank Indonesia	AC standing floor	2	51.252.117	102.504.234
	Bank Indonesia	AC standing floor	1	51.252.118	51.252.118
Total					510.438.153

lampiran 6 : Pembayaran Pekerjaan Kontraktual Menggunakan RPBATA

No	Uraian Pekerjaan	No. SP2D	Nilai SP2D	Pembayaran ke Penyedia bulan Januari 2025	Pengembalian ke RKUD	Keterangan
1	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung A dan B Kantor Dinas Sosial	1 042243/SP2D/XII/2024	745.108.500	700.796.500	44.312.000	Pengembalian atas penyesuaian nilai kontrak
2	Perencanaan Pemeliharaan Gedung A dan B Kantor Dinas Sosial	1 042636/SP2D/XII/2024	84.360.000	84.357.100	2.900	Biaya Transfer
3	Pengawasan Pemeliharaan Gedung A dan B Kantor Dinas Sosial	1 042656/SP2D/XII/2024	98.401.500	93.939.300	4.462.200	Pengembalian atas penyesuaian nilai kontrak
4	Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Pantii Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng	1 042244/SP2D/XII/2024	1.796.320.220	1.747.800.357	48.519.863	Pengembalian atas Denda Keterlambatan
5	Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Pantii Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	1 042245/SP2D/XII/2024	733.402.000	-	733.402.000	Pengembalian atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dan akan diakui sebagai utang daerah
6	Pengawasan Rehab Berat Gedung Pantii Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng	1 042246/SP2D/XII/2024	171.228.600	48.995.400	122.233.200	Pengembalian atas penyesuaian nilai kontrak
7	Pelaksanaan Rehab Total Gedung Pantii Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng	1 042529/SP2D/XII/2024	2.603.904.563	2.603.904.563	-	terbayarkan sesuai nilai kontrak
8	Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Gedung Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	1 042530/SP2D/XII/2024	297.514.688	-	297.514.688	Pengembalian atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dan akan diakui sebagai utang daerah
10	Pengawasan Rehab Total Gedung Pantii Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng	1 042634/SP2D/XII/2024	215.878.350	215.878.350	-	terbayarkan sesuai nilai kontrak
11	Pengawasan Rehab Berat Gedung Pantii Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	1 042635/SP2D/XII/2024	148.584.600	-	148.584.600	Pengembalian atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dan akan diakui sebagai utang daerah